
INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SUBANG

2023

<https://subangkab.bps.go.id>



**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
KABUPATEN SUBANG**

2023



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN SUBANG

2023

ISSN : 2808-053x
Nomor Publikasi : 32130.2342
Katalog BPS : 4102004.3213
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xv + 88 halaman

Naskah : Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Cover : Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN SUBANG

2023

Tim penyusun

Pengarah : Muhammad Sholihin, SE., M.M

Penanggung Jawab : Indra Satrio, S.Si.,M.E

Naskah : Indra Satrio, S.Si.,M.E

Cover Luar : Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting : Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Subang 2023 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Subang yang menyajikan perkembangan kesejahteraan rakyat Kabupaten Subang tahun 2022. Publikasi ini berisi berbagai data yang bersumber dari data BPS yaitu hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2022, Sakernas, dan proyeksi Penduduk 2017-2022.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut 8 bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik bagi instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi berbagai pihak sehingga publikasi ini dapat terbit tepat waktu.

Subang, Desember 2023

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Subang

Muhammad Sholihin, S.E., M.M

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xi
1. Kependudukan	3
1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	4
1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk	6
1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan	8
1.4 Fertilitas	11
1.5 Wanita Menurut Usia Kawin Pertama	11
1.6 Penggunaan Alat/Cara KB	13
2. Kesehatan dan Gizi	17
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	17
2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita	19
2.3 Pemanfaatan Fasilitas tenaga Kesehatan	22
3. Pendidikan	27
3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis	27
3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah .	29
3.3 Tingkat Pendidikan	30
3.4 Partisipasi Sekolah (APS dan APM)	32

4.	Ketenagakerjaan	38
4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	39
4.2	Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan	44
4.3	Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	47
4.4	Sektor Formal dan Sektor Informal	49
5.	Pola Konsumsi	54
5.1	Pengeluaran Rumah Tangga	54
6.	Perumahan dan Lingkungan	64
6.1	Kualitas Rumah Tinggal	65
6.2	Fasilitas Rumah Tinggal	68
6.3	Status Kepemilikan Rumah Tinggal	70
7.	Kemiskinan	75
7.1	Perkembangan Penduduk Miskin	77
7.2	Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	78
7.3	Karakteristik Pendidikan	81
7.4	Karakteristik Ketenagakerjaan	83
7.5	Karakteristik Perumahan	85
8.	Sosial Lainnya	89
8.1	Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi	90
8.2	Pemberian Kredit Usaha dan Pelayanan Kesehatan Gratis	91
8.3	Tindak Kejahatan	93

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Persentase Penduduk yang Menderita Sakit selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Subang, 2021 - 2022	17
Tabel 2.2	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir Kabupaten Subang 2021 - 2022	21
Tabel 2.3	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kelamin, 2021 dan 2022.....	23
Tabel 3.1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca Dan Menulis di Kabupaten Subang 2021-2022.....	26
Tabel 4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Ijazah yang Dimiliki di Kabupaten Subang, 2022	41
Tabel 4.2	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan di Kabupaten Subang, Agustus 2022	43
Tabel 4.3	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Informal Menurut Wilayah di Kabupaten Subang, Agustus 2022	46
Tabel 5.1	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kabupaten Subang, 2022	49
Tabel 5.2	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang dan Wilayah Tempat Tinggal di Jawa Barat, 2022	51

Tabel 6.1	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Subang 2021-2022	56
Tabel 6.2	Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, Tahun 2021 -2022	60
Tabel 6.3	Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Subang, 2016 -2017	62
Tabel 7.1	Rumah Tangga Miskin yang Pernah Menerima Bantuan di Kabupaten Subang, 2021 – 2022.....	76
Tabel 8.1	Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir di Kabupaten Subang, 2021-2022	78

DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>
Grafik 1.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Subang Tahun 2016-2022	4
Grafik 1.2 Laju pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Subang Tahun 2017-2022	5
Grafik 1.3 Kepadatan Penduduk per km ² di Kabupaten Subang Tahun 2022	7
Grafik 1.4 Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Subang Tahun 2022	9
Grafik 1.5 Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Subang Tahun 2021-2022	10
Grafik 1.6 Persentase Wanita Yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Subang 2021-2022	12
Grafik 1.7 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Yang Pernah Kawin di Kabupaten Subang dan Alat KB/Cara Tradisional Yang Sedang Digunakan 2021-2022	14
Grafik 2.1 Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Kabupaten Subang (tahun) 2016-2022.....	16

Grafik 2.2	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir yang Melakukan Inisiasi Menyusui Dini dan Jarak Waktu Menyusui Pertama Kali dengan Kelahiran	18
Grafik 2.3	Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi, di Kabupaten Subang Tahun 2021-2022.....	20
Grafik 2.4	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Persalinan Terakhir Tahun 2022	22
Grafik 3.1	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Subang (tahun) 2021-2022	27
Grafik 3.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Subang 2022	29
Grafik 3.3	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah, 2021-2022	30
Grafik 3.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Tahun 2018-2021	31
Grafik 3.5	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 5-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2021.....	33
Grafik 4.1	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas dan Angkatan Kerja di Kabupaten Subang, Agustus 2022	36
Grafik 4.2	Jumlah Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja di Kabupaten Subang Tahun 2022	37
Grafik 4.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Subang, Agustus 2022.....	38
Grafik 4.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kabupaten Subang, Agustus 2022	39

Grafik 4.5	Jumlah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Subang, Agustus 2022	40
Grafik 4.6	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Subang, Agustus 2022	44
Grafik 4.7	Struktur Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja di Kabupaten Subang, Agustus 2022	45
Grafik 4.8	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Subang Agustus 2017	56
Grafik 4.9	Struktur Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja di Kabupaten Subang, Agustus 2017	57
Grafik 4.10	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Informal Menurut Ijasah yang Dimiliki dan Wilayah di Kabupaten Subang, 2017	59
Grafik 5.1	Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kabupaten Subang 2022	50
Grafik 5.2	Indeks Gini Kabupaten Subang, 2016 – 2022	54
Grafik 6.1	Persentase Rumah tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kabupaten Subang 2021-2022	58
Grafik 7.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Subang, 2016-2022 (Maret, puluhan ribu Orang)	67
Grafik 7.2	Garis Kemiskinan di Kabupaten Subang, 2016 - 2022 (Rupiah/Kapita/Bulan)	68
Grafik 7.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Subang, Tahun 2016 – 2022	69
Grafik 7.4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Subang 2016 - 2022	70
Grafik 7.5	Penduduk Miskin Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Subang, 2021 - 2022	71
Grafik 7.6	Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kabupaten Subang, 2021 – 2022	72

Grafik 7.7	Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja dan Bidang Pekerjaan di Kabupaten Subang, 2021 – 2022	74
Grafik 8.1	Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan di Kabupaten Subang Sejak Maret 2021 – Februari 2022	82

<https://subangkab.bps.go.id>

Bab 1

Kependudukan

<https://subangkubps.go.id>

1 KEPENDUDUKAN

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2006). Penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan, sekaligus juga yang menikmati hasil pembangunan namun juga bisa menjadi masalah yang bisa menghambat pembangunan suatu negara. Masalah kependudukan sangat mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan suatu daerah dan Negara.

Masalah yang berkaitan dengan penduduk merupakan tugas besar dari semua pihak khususnya pemerintah untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dalam mengatasinya. Masalah kependudukan adalah salah satu masalah krusial yang mengakibatkan efek domino terhadap permasalahan lain yaitu lingkungan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

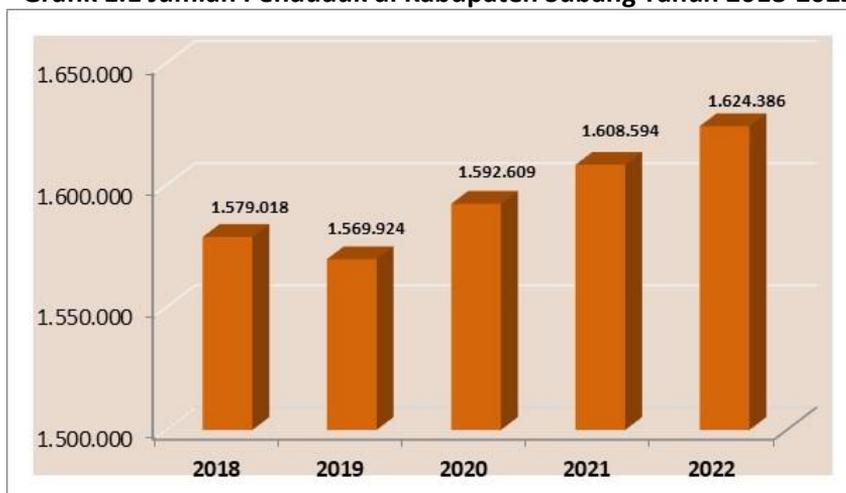
Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam hal kependudukan, karena Jumlah Penduduk Indonesia merupakan penduduk terbesar di kawasan ASEAN dan merupakan urutan empat terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Berdasarkan Proyeksi Interim 2020-2023, jumlah penduduk di Kabupaten Subang pada tahun 2022 berjumlah

1.624.386 jiwa dengan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,98 persen dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 750 jiwa/km².

1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Dengan banyaknya jumlah penduduk yang terdapat di Kab. Subang maka akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat kedepannya. Dampak tersebut harus dicarikan solusi yang tepat untuk menanggulangnya. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah dari sisi ketenagakerjaan, dimana semakin banyak jumlah pengangguran karena jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak memadai dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Dengan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan yang ada, Kab. Subang tentunya membutuhkan berbagai sarana dan prasarana pendukung sebagai tindakan preventif dan penyelesaian terhadap berbagai masalah yang disebabkan oleh kepadatan penduduk yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.

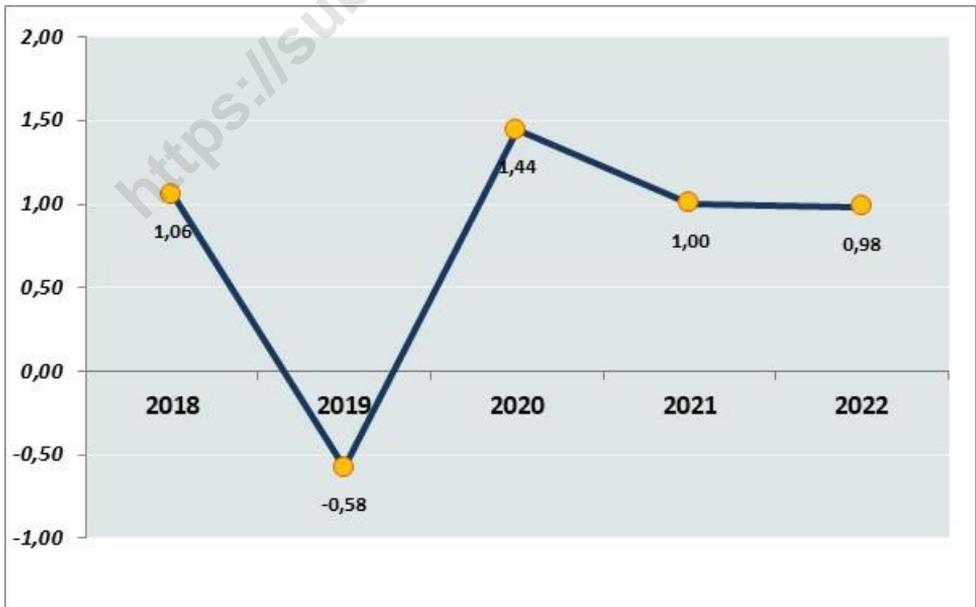
Grafik 1.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Subang Tahun 2018-2022



Sumber: Jumlah Penduduk (Pertengahan Tahun)

Berdasarkan hasil proyeksi interim, jumlah penduduk Kabupaten Subang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Subang sebanyak 1.579.018 jiwa mengalami peningkatan sebesar 2,87 persen pada tahun 2022 atau dengan kata lain mengalami penambahan sebanyak 45.368 jiwa. Dari jumlah penduduk sebanyak 1.624.386 jiwa pada tahun 2022 tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Subang, dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Subang sebanyak 141.038 jiwa, dan Kecamatan Ciasem sebanyak 112.111 jiwa.

Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Subang Tahun 2018-2022



Sumber : Proyeksi Penduduk Hasil SP2010 Kabupaten Subang

Dilihat dari grafik laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Subang sebesar -0,58 persen atau mengalami kontraksi jika dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 1,06 persen. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Subang sebesar 1,44 persen dan mengalami pertumbuhan 2,02 persen dari tahun 2019. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Subang mengalami perlambatan sebesar 1,00 persen. Kemudian pada tahun 2022, mengalami perlambatan kembali ke 0,98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program pengendalian jumlah penduduk mulai berhasil dijalankan di Kabupaten Subang periode 2018-2022.

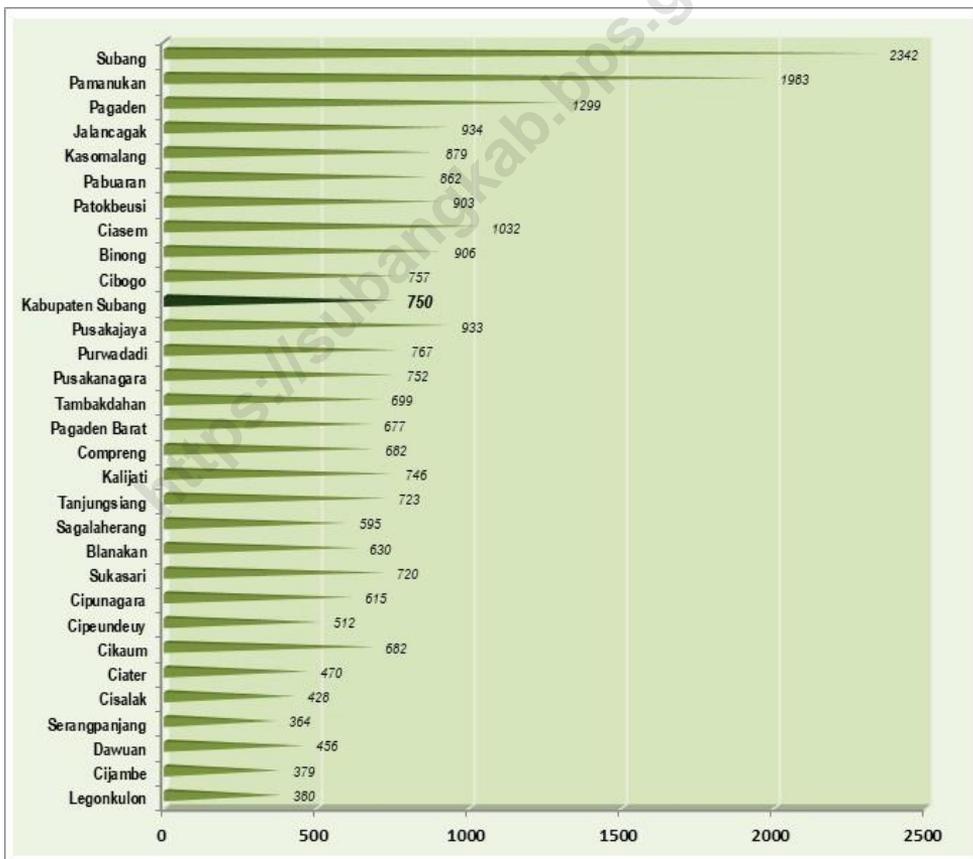
1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Persoalan lain yang terkait dengan dengan jumlah penduduk adalah sebaran penduduk, kepadatan penduduk dan distribusi penduduk yang tidak merata. Apabila kita lihat sebaran penduduk di Kabupaten Subang, terlihat bahwa penduduk Kabupaten Subang terpusat di daerah ibukota Kabupaten Subang yaitu di Kecamatan Subang. Sebaran penduduk yang tidak merata akan menimbulkan banyaknya permasalahan kependudukan, seperti kemacetan, pengangguran, kebutuhan pemukiman dan masalah-masalah lain.

Jika dilihat dari kepadatan penduduk di Kabupaten Subang, terlihat di wilayah perkotaan lebih padat dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Dari Grafik 1.3 terlihat 6 kecamatan berada di peringkat atas dari sisi kepadatan penduduk, dengan kepadatan penduduk di atas 1.000 jiwa per km². Kecamatan Subang menjadi daerah terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 2.342 jiwa per km² sedangkan 5 kecamatan

yang lain yaitu Kecamatan Pamanukan, Kecamatan Pagaden, Kecamatan Ciasem, Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Pusakajaya kepadatan penduduk berkisar antara 933 sampai 1.983 jiwa per km². Secara umum wilayah Kabupaten Subang pada tahun 2022 memiliki kepadatan penduduk sebesar 750 jiwa per km².

Grafik 1.3. Kepadatan Penduduk per Km² di Kabupaten Subang Tahun 2022



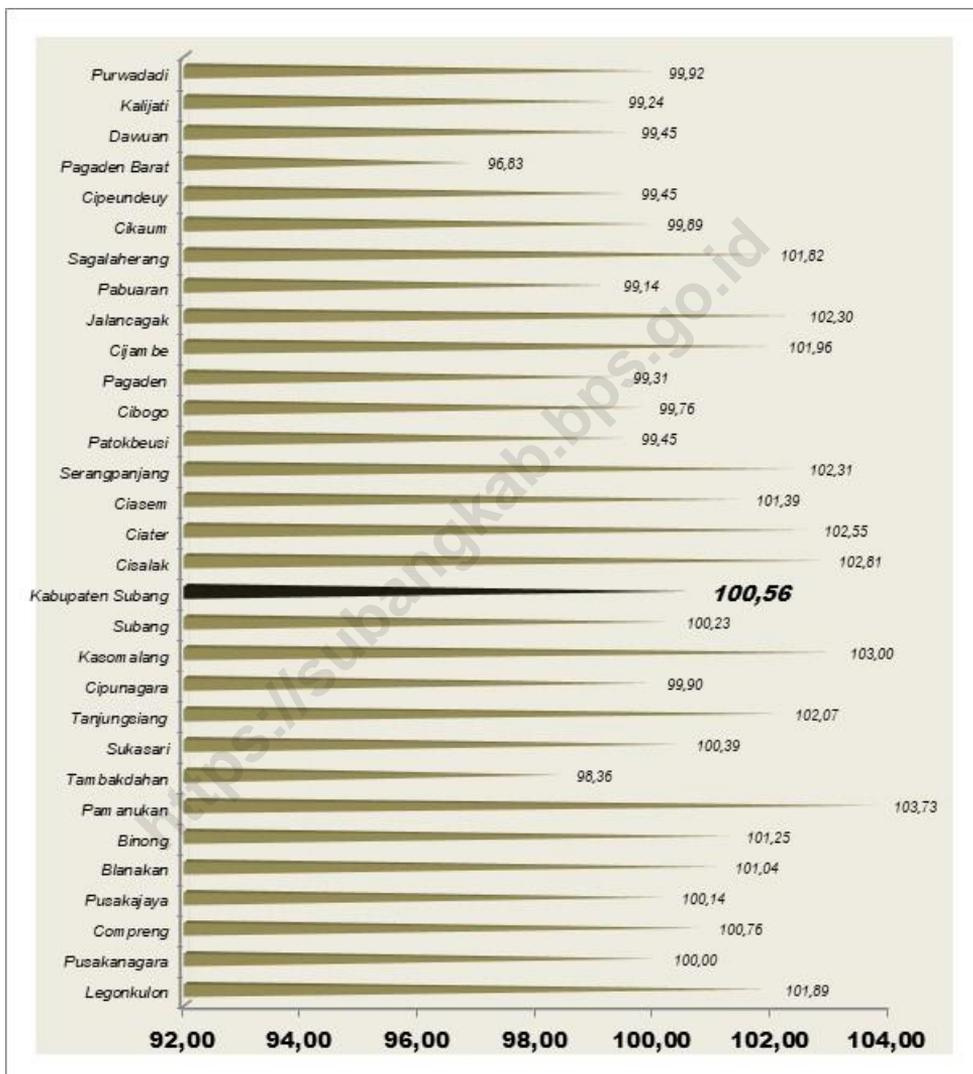
Sumber : Subang Dalam Angka 2023

1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) dan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang sangat penting. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah, sedangkan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) menunjukkan berapa tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

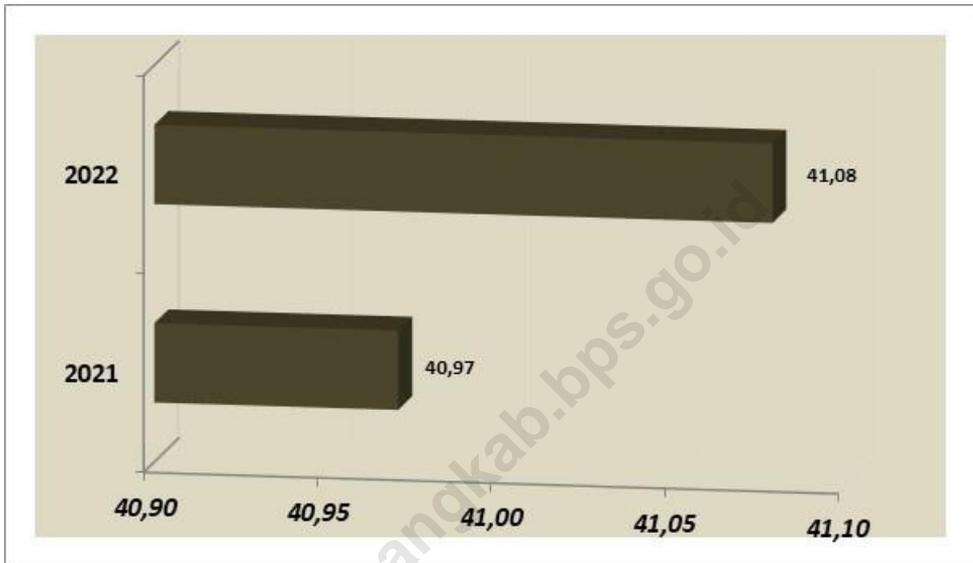
Komposisi penduduk Kabupaten Subang jika dilihat dari rasio jenis kelamin, pada tahun 2022 sebesar 100,56. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 101 penduduk laki-laki, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Apabila kita lihat rasio jenis kelamin per kecamatan di Kabupaten Subang, maka dari 30 kecamatan terdapat 12 kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100, dengan rasio jenis kelamin terkecil pada Kecamatan Pagaden Barat yaitu sebesar 96,83, kemudian diikuti oleh Kecamatan Tambakdahan sebesar 98,36, Kecamatan Pabuaran sebesar 99,14, Kecamatan Kalijati sebesar 99,24, Kecamatan Pagaden sebesar 99,31, Kecamatan Patokbeusi sebesar 99,45, Kecamatan Cipeundeuy sebesar 99,45, Kecamatan Dawuan sebesar 99,45, Kecamatan Cibogo sebesar 99,76, Kecamatan Cikaum sebesar 99,89, Kecamatan Cipunagara sebesar 99,90, dan kecamatan Purwadadi sebesar 99,92. Hal ini mengindikasikan bahwa di kedua belas kecamatan tersebut jumlah penduduk perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Grafik 1.4 Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Subang Tahun 2022



Sumber : Subang Dalam Angka 2023

Grafik 1.5. Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Subang Tahun 2020 – 2022



Sumber : Subang Dalam Angka 2023, diolah

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) tidak hanya digunakan untuk melihat seberapa besar beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif tetapi juga dijadikan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Angka Beban Ketergantungan penduduk di Kabupaten Subang pada tahun 2022 sebesar 41.08. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 41 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, maka ABK tersebut mengalami kenaikan dimana pada tahun 2021 ABK Kabupaten Subang sebesar 40,97. Semakin besar

angka beban ketergantungan maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dan semakin besar pula upaya dan hambatan yang harus dilakukan dan ditangani oleh pemerintah setempat.

1.4 Fertilitas

Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah. Angka fertilitas yang tinggi bisa menyebabkan penambahan penduduk di suatu wilayah, ledakan jumlah penduduk akan terjadi apabila angka fertilitas yang tinggi tetapi angka mortalitas atau kematian yang rendah.

Menurut Ida Bagus Mantra (1985), terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi fertilitas yang dibedakan atas faktor-faktor demografi dan faktor-faktor non demografi. Faktor-faktor demografi antara lain struktur atau komposisi umur, status perkawinan, umur kawin pertama, keperidian atau fekunditas, dan proporsi penduduk yang kawin. Faktor-faktor non demografi antaranya keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status wanita, urbanisasi dan industrialisasi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fertilitas.

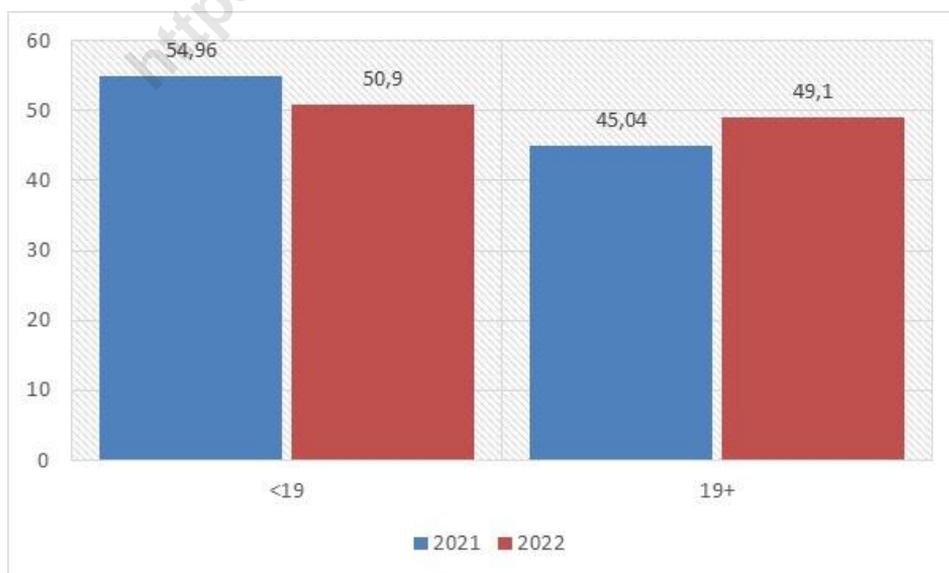
1.5 Wanita Menurut Usia Kawin Pertama

Usia Kawin Pertama bisa dijadikan salah satu pemicu penambahan jumlah penduduk, semakin panjang masa reproduksi seorang wanita semakin banyak kemungkinan anak yang bisa dilahirkan. Menurut UU Perkawinan 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat

menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali (pasal 6 ayat 2).

Sedangkan menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi remaja saat ini idealnya 21 hingga 25 tahun. Pada usia itu, remaja sudah tumbuh pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan kesehatan reproduksi. Hal itu berpengaruh terhadap kesehatan pasangan maupun anak dari pasangan muda itu, jadi dimasa mendatang usia remaja menikah pertama pada usia dewasa. Dengan tumbuhnya usia nikah semakin dewasa dapat menunjang keberhasilan program KB melalui menurunnya angka anak dilahirkan seorang ibu atau Angka kelahiran Total (TFR).

Grafik 1.6. Persentase Wanita yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Subang, 2021 – 2022



Sumber : Susenas, Maret 2022

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2022, sebagian besar wanita di Kabupaten Subang melakukan perkawinan pertamanya pada usia 19 tahun kebawah yaitu sebesar 50,90 persen, sedangkan pada tahun sebelumnya yang paling banyak wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia 19 tahun kebawah yaitu sebesar 54,96 persen.

Yang perlu kita telaah lebih lanjut yaitu wanita yang melakukan perkawinan pertama di usia kurang dari 19 tahun menunjukkan tren yang menurun pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya kesiapan dan kematangan seorang wanita dalam berumah tangga semakin meningkat di Kabupaten Subang. Indikasi tersebut menunjukkan sesuatu yang positif bagi penduduk wanita di Kabupaten Subang.

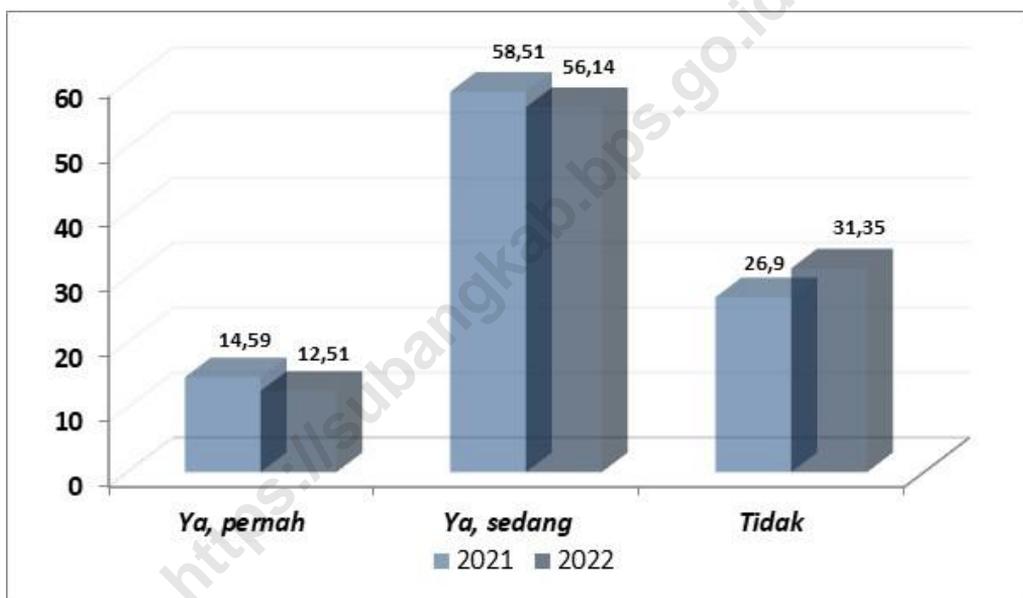
1.6 Penggunaan Alat/Cara KB

Pemerintah saat ini sudah menggalakkan kembali program KB (Keluarga Berencana). Program ini tidak hanya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui kelahiran, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta mewujudkan bonus demografi yang berkualitas.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2022, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB adalah 56,14 persen. Sementara yang tidak pernah menggunakan 31,35 persen dan yang pernah menggunakan 12,51 persen. Sedangkan pada tahun sebelumnya persentase wanita yang menggunakan alat KB lebih sedikit yaitu 56,14 persen. Hal ini mengindikasikan kesadaran akan keluarga berencana di kalangan

penduduk Kabupaten Subang semakin meningkat dan fenomena ini juga merupakan salah satu usaha dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Subang.

Grafik 1.7. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin di Kabupaten Subang dan Alat KB/Cara Tradisional yang Sedang Digunakan Tahun 2021-2022



Sumber : Susenas, Maret 2021-2022

Bab 2

Kesehatan dan Gizi

<https://subangkabpps.go.id>

2 KESEHATAN & GIZI

Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat, pemerintah dan swasta bersama-sama. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah sudah melakukan berbagai program-program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti dengan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti melalui BPJS, puskesmas-puskesmas, meningkatkan fasilitas tenaga kesehatan, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, meningkatkan tingkat Imunitas dan gizi balita dan sebagainya.

Berhasil tidaknya program-program pemerintah dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan berbagai indikator kesehatan seperti Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Angka Kesakitan, prevalensi Balita Kurang Gizi dan indikator-indikator yang lain yang berkaitan dengan tenaga medis dan fasilitas kesehatan.

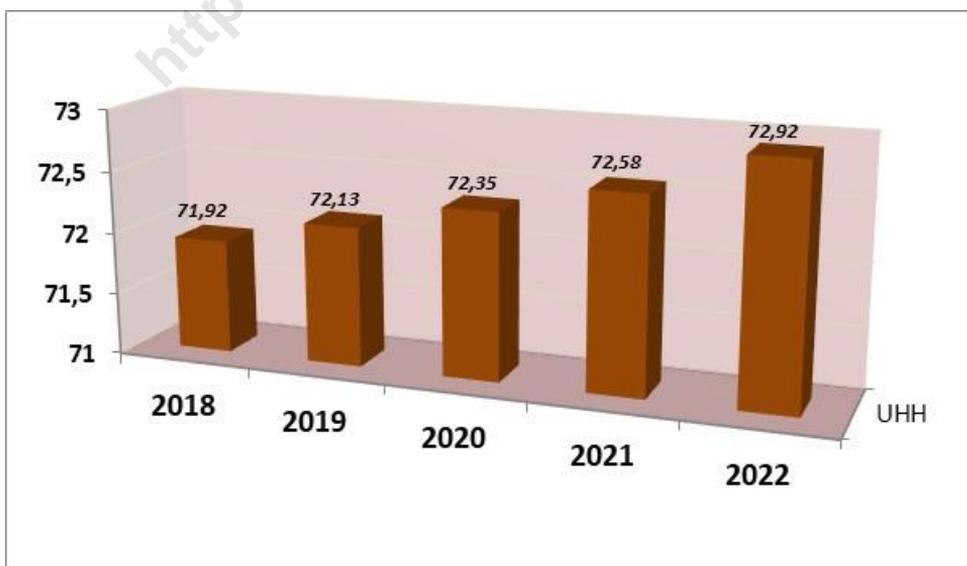
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Dimensi kesehatan salah satunya dapat dilihat dari Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang

dan hidup sehat. Selama periode 2018 hingga 2022, Kabupaten Subang telah berhasil meningkatkan Usia Harapan Hidup saat lahir sebesar 1,00 tahun. Pada tahun 2018, Usia Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Subang hanya sebesar 71,92 tahun, dan pada tahun 2022 telah mencapai 72,92 tahun. Semakin meningkatnya usia harapan hidup mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Subang mengalami usia yang lebih panjang dari tahun ke tahun.

Peningkatan usia harapan hidup sangat dipengaruhi banyak faktor, seperti semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Grafik 2.1 Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kabupaten Subang (tahun) 2018-2022



Sumber : IPM, 2022

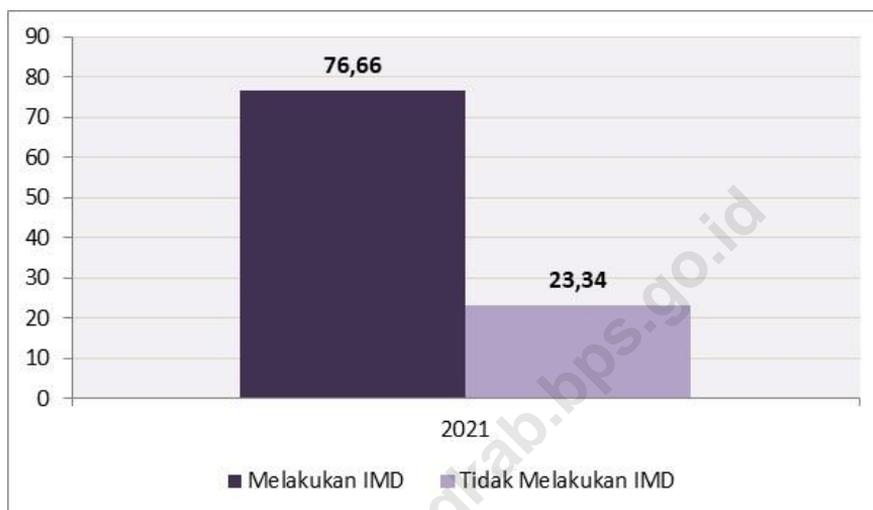
Jika kita lihat Usia Harapan Hidup per tahun pada grafik 2.1, kenaikan Usia Harapan Hidup yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,34 tahun dari tahun sebelumnya yaitu 72,58 tahun menjadi 72,92 tahun pada tahun 2022. Sementara Angka Harapan Hidup tahun 2020 meningkat sebesar 0,22 tahun dari tahun 2019.

2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena ASI mengandung zat gizi dengan komposisi sesuai dengan kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang bayi secara optimal (WHO 2001; Prasetyono, 2009). Selain itu peningkatan program ASI eksklusif merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Air Susu ibu sangat dianjurkan untuk diberikan kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang sangat dibutuhkan bayi untuk jangka panjang dalam proses tumbuh kembang. ASI memiliki nutrisi terbaik dan zat-zat berkualitas tinggi yang bisa memberikan antibodi dan tingkat kecerdasan untuk bayi.

Grafik 2.2 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Status Inisiasi Menyusui Dini, 2021



Sumber : Susenas, Maret 2021

Inisiasi menyusui dini adalah langkah penting untuk memudahkan bayi dalam memulai proses menyusui. Bayi baru lahir yang diletakkan pada dada atau perut sang ibu, secara alami dapat mencari sendiri sumber air susu ibu (ASI) dan menyusui. Proses penting inilah yang disebut inisiasi menyusui dini (IMD).

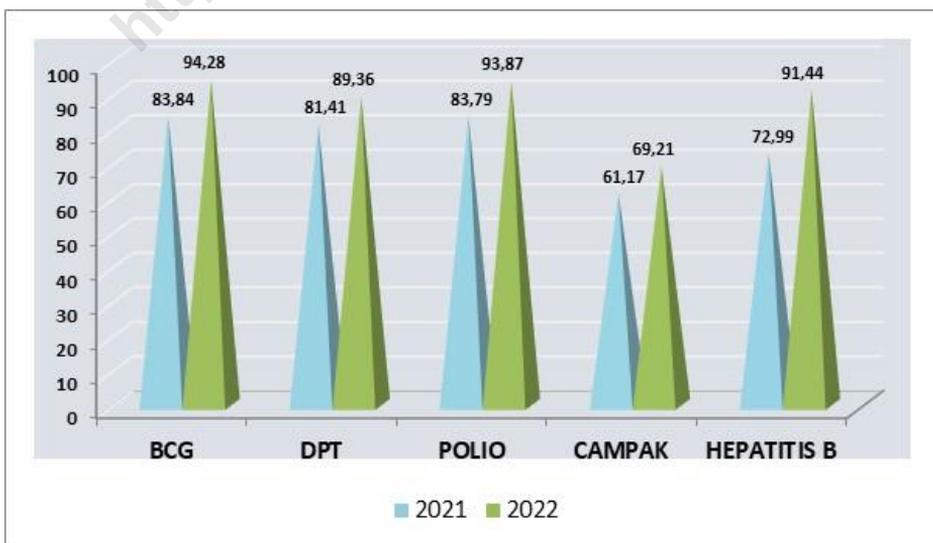
Hasil survey Susenas 2021, di Kabupaten Subang pada tahun 2021, terdapat 76,66 persen yang melakukan inisiasi menyusui dini. Sedangkan yang tidak melakukan inisiasi menyusui dini sebesar 23,34 persen. Dengan demikian, kesadaran masyarakat di Kabupaten Subang akan pentingnya memberi ASI pada bayinya cukup tinggi.

Selain ASI hal yang sangat diperlukan untuk bagi kesehatan anak dan tingkat kekebalan tubuh anak adalah pemberian imunisasi. Imunisasi merupakan pemberian sistem kekebalan tubuh anak agar kuat terhadap

suatu penyakit, jenis imunisasi ada dua macam yaitu kekebalan tubuh yang sudah ada pada diri anak yang merupakan bawaan sejak lahir dan kekebalan yang diberikan kepada anak seperti pemberian vaksin bisa melalui suntik ataupun tetes. Di Indonesia imunisasi ada yang wajib dan juga ada yang dianjurkan, imunisasi wajib seperti BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B, sedangkan beberapa imunisasi yang dianjurkan seperti Typus, influenza, MMR dan masih banyak lagi.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, hampir semua balita yang ada di Kabupaten Subang pernah mendapatkan imunisasi, hal ini terlihat dari Grafik 2.3 berikut, bahwa lebih dari 80 persen balita mendapat imunisasi seperti BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B. Pada tahun 2022 persentase terbesar adalah imunisasi BCG dengan persentase sebesar 94,28 persen kemudian diikuti oleh imunisasi Polio.

Grafik 2.3 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi, di Kabupaten Subang Tahun 2021-2022



Sumber : Susenas, Maret 2022

2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi fasilitas tenaga kesehatan sangatlah penting, tenaga medis yang handal dan fasilitas kesehatan yang lengkap sangat penting yang bisa mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi. Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya melalui berbagai program-program kesehatan salah satunya melalui perbaikan fasilitas kesehatan seperti yang tercantum pada Perpres No 5 tahun 2010.

Tabel 2.2 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir Kabupaten Subang 2021-2022

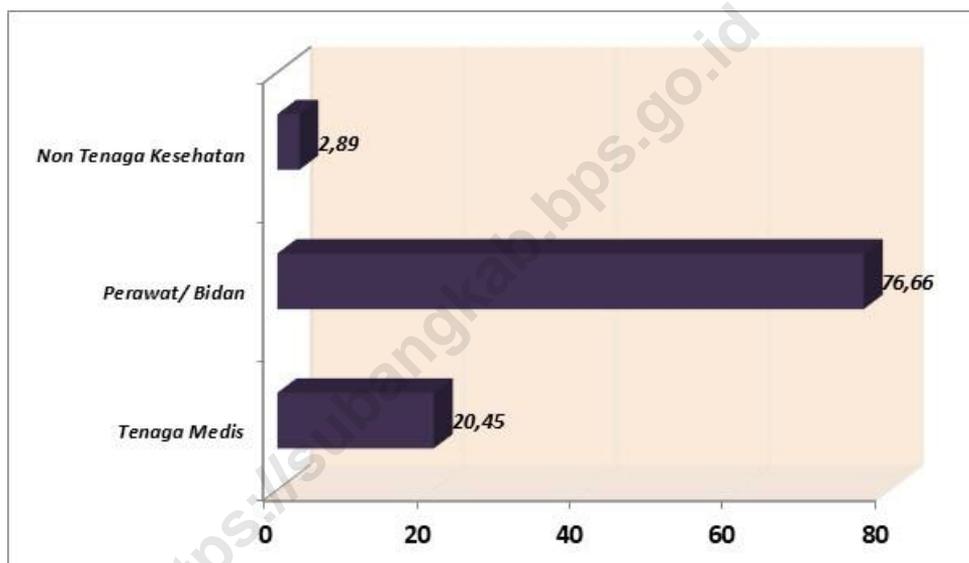
Tahun	Tenaga Medis	Perawat/ Bidan	Non Tenaga Kesehatan
2021	25,53	72,73	1,73
2022	20,45	76,66	2,89

Sumber : Susenas, Maret 2021-2022

Secara umum dilihat dua tahun terakhir, di Kabupaten Subang persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin jika dilihat dari penolong proses kelahirannya, paling banyak ditolong oleh bidan, yaitu lebih dari 75 persen. Sementara itu proses kelahirannya dibantu oleh tenaga medis (dokter) pada tahun 2022 sebesar 20,45 persen dan pada tahun 2021 sebesar 25,53 persen. Sedangkan persentase penolong kelahiran oleh tenaga non medis misalnya dukun beranak/paraji meningkat dari tahun 2021 ke 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya

penolong persalinan baik dari segi pengetahuan kesehatan maupun peralatan pendukungnya perlu ditingkatkan.

Grafik 2.4 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Persalinan Terakhir Tahun 2022



Sumber : Susenas, Maret 2022

Dari grafik 2.4 diatas terlihat bahwa penolong persalinan terakhir tahun 2022 didominasi oleh Perawat/ Bidan, yaitu sebesar 76,66 persen. Disusul oleh Dokter Kandungan/ Tenaga Medis sebesar 20,45 persen. Sedangkan persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga non medis seperti dukun beranak/paraji sebesar 2,89 persen. Semakin meningkatnya pendidikan masyarakat di Kabupaten Subang menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sosok penolong persalinan yang dijalani.

Hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan tidak hanya penolong persalinan, tetapi juga fasilitas tempat berobat. Pemanfaatan

fasilitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal. Jarak rumah ke tempat berobat sangat mempengaruhi dalam menentukan pilihan dimana mereka akan berobat.

Menurut data Susenas 2022 yang diperoleh, dari total penduduk di Kabupaten Subang yang dirawat inap tersebut, terdapat 4,86 persen penduduk yang pernah rawat inap baik di Rumah Sakit, Puskesmas, ataupun fasilitas non medis lainnya. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 4,24 persen. Baik tahun 2021 maupun 2022, perempuan merupakan yang paling banyak melakukan rawat inap dibandingkan laki-laki.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kelamin, 2021 dan 2022

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
2021	3,42	5,07	4,24
2022	4,56	5,17	4,86

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2022

Bab 3

Pendidikan

<https://subangkabpps.go.id>

3 PENDIDIKAN

Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam UU. No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk *survive* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah.

3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan membaca dan menulis sangat penting karena dapat mencerdaskan intelektual, spiritual, emosional, dan kepercayaan. Membaca akan membuka peluang untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dan memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Kemampuan membaca dan menulis juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan kreatif, kritis, analitis dan imajinatif sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

Secara umum kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Subang cukup bagus, hal ini terlihat dari persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf latin pada tahun 2021 dan 2022 persentasenya cukup besar yaitu diatas 95 persen, dimana pada tahun 2022 persentasenya sebesar 99,88 persen dan 96,53 persen pada tahun 2021. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa selama 2 tahun terakhir hampir semua penduduk di Kabupaten Subang sudah mampu membaca dan menulis huruf latin.

Apabila dirinci berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis lebih besar dari pada perempuan baik pada tahun 2021 maupun tahun 2022. Penduduk laki-laki yang bisa membaca dan menulis di tahun 2022 sebesar 100,00 persen dan perempuan sebesar 99,76 persen. Persentase penduduk laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Subang yang bisa membaca dan menulis huruf arab juga cukup besar yaitu sebesar 90,74 persen laki-laki dan sebesar 89,44 persen perempuan.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca Dan Menulis, 2021-2022

No	Tahun	Laki-laki			Perempuan		
		Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya
1	2021	97,64	71,37	2,47	94,09	66,08	1,64
2	2022	100,00	90,74	5,19	99,76	89,44	4,21

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2021-2022

3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2018 hingga 2022, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Subang telah meningkat sebesar 0,10 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,36 tahun.

Grafik 3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Subang 2018-2022



Sumber : IPM 2022

Selama periode 2018 hingga 2022, Harapan Lama Sekolah terus meningkat perkembangannya setiap tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dapat diartikan bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Subang telah mencapai 11,78 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki

peluang untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah menengah atas (SMA).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk di suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Subang terus meningkat pertumbuhannya dari tahun ke tahun selama periode 2018 hingga 2022. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Subang yang lebih baik. Hingga tahun 2022, secara rata-rata penduduk Kabupaten Subang usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VI atau lulus sekolah dasar (Grafik 3.2).

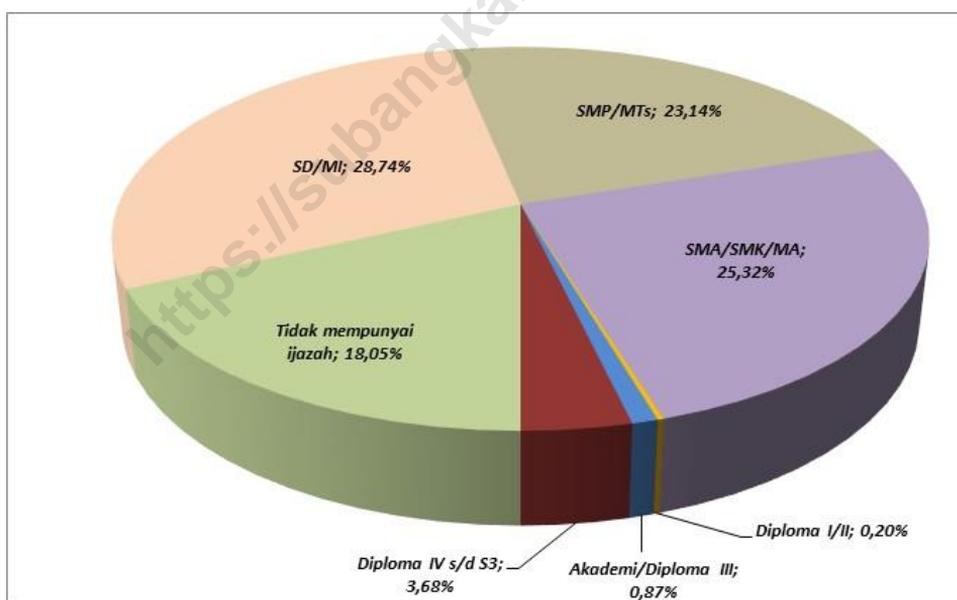
3.3 Tingkat Pendidikan

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Kualitas Sumber daya manusia dapat dilihat dari kemampuan, keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan melalui tingkat pendidikan.

Berdasarkan data hasil Susenas 2022, penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Subang yang memiliki ijazah tertinggi SD/MI mempunyai persentase paling besar yaitu sebesar 28,74 persen atau bisa dikatakan mayoritas penduduk di Kabupaten Subang baru berpendidikan tamat SD/MI, kemudian tingkat SMA/SMK/MA yaitu sebesar 25,32 persen

dan SMP/MTs sebesar 23,14 persen. Hal yang perlu menjadi perhatian serius untuk Pemerintah Kabupaten Subang adalah jumlah penduduk yang bahkan tidak mempunyai ijazah masih cukup besar di Kabupaten Subang yaitu sebesar 18,05 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kejadian putus sekolah masih cukup tinggi. Gambaran diatas juga menunjukkan bahwa program pemerintah di bidang pendidikan masih harus terus ditingkatkan demi tercapainya program wajib belajar 9 tahun.

Grafik 3.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Subang 2022

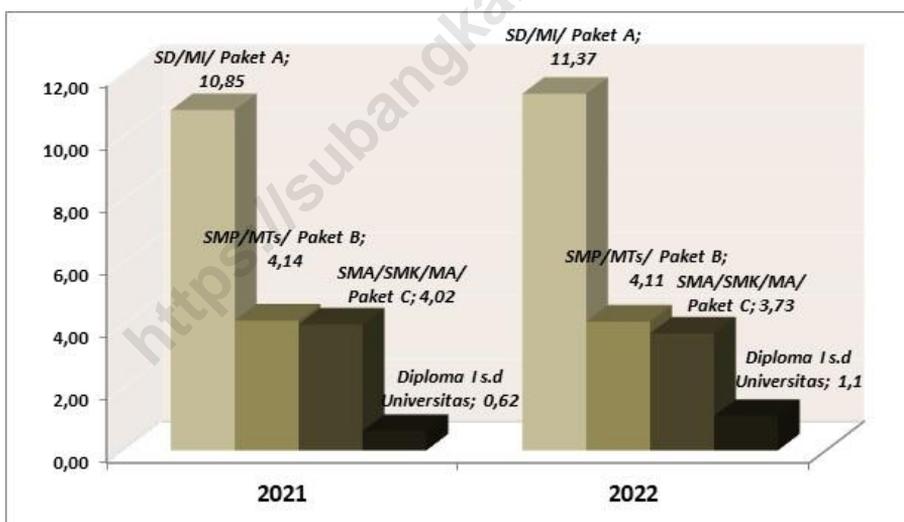


Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2022, diolah

Untuk penduduk berumur lima tahun ke atas yang masih bersekolah pada dua tahun terakhir di Kabupaten Subang persentase terbesar juga pada tingkat setara SD yaitu sebesar 10,85 persen pada

tahun 2021 dan 11,37 persen pada tahun 2022. Sedangkan yang masih bersekolah di tingkat Diploma I/ Universitas persentasenya paling kecil yaitu sebesar 0,62 persen pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 1,10 persen pada tahun 2022. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C, jumlah penduduk yang masih bersekolah pada tahun 2022 mengalami perlambatan menjadi 3,73 persen dari sebelumnya sebesar 4,02 persen.

Grafik 3.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah, 2021-2022



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2022

3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)

Peningkatan mutu pendidikan masih terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak

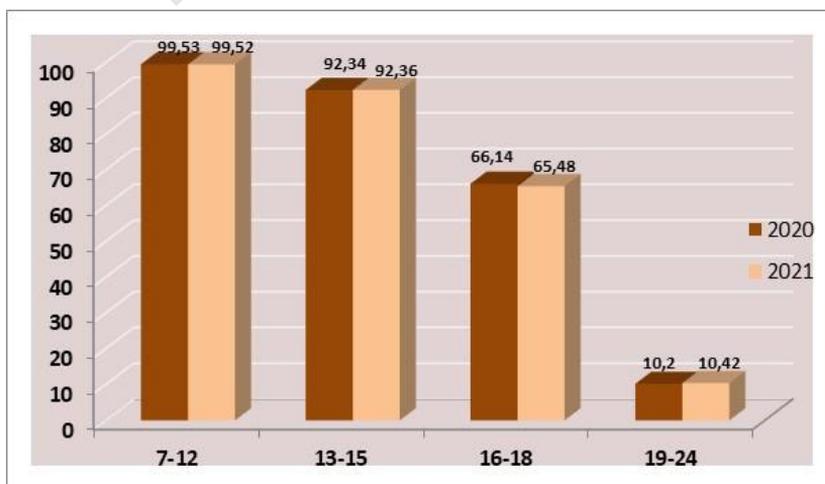
penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dilihat dari beberapa indikator antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Berdasarkan Susenas Maret tahun 2021, terjadi peningkatan APS pada kelompok umur berumur 13-15 dan 19-24 tahun di daerah Kabupaten Subang. Pada waktu yang sama, APS penduduk berumur 7-12 dan 16-18 tahun terjadi penurunan.

Grafik 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2021

APS penduduk berumur 7-12 tahun pada tahun 2021 sebesar 99,52 persen atau mengalami penurunan 0,01 point dari tahun sebelumnya yang sebesar 99,53 persen. APS penduduk berumur 13-15 tahun 2021 sebesar 92,36 persen atau mengalami peningkatan 0,02 point dari tahun sebelumnya (tahun 2020) yang sebesar 92,34 persen.

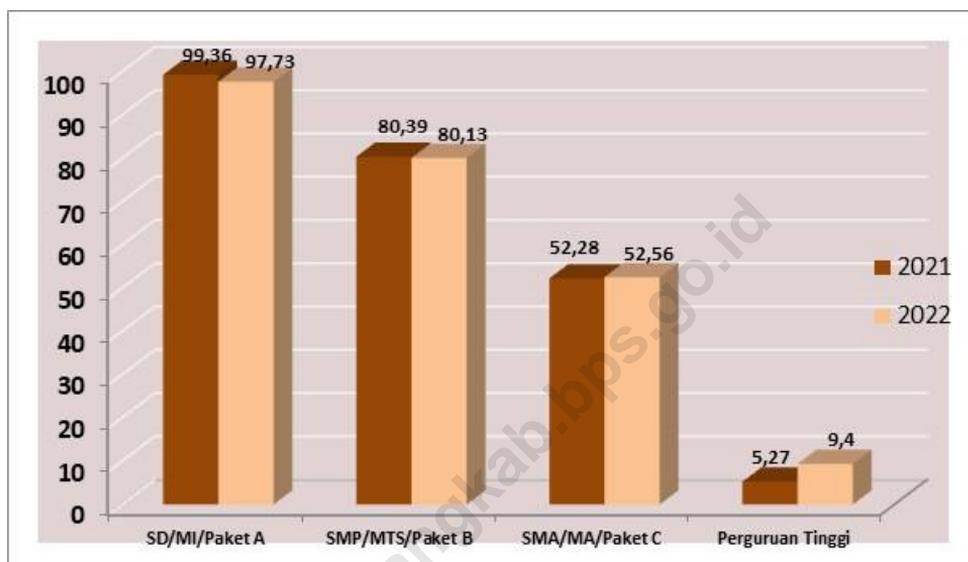
Peningkatan APS pada kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian, APS penduduk berumur 16-18 tahun mengalami penurunan yaitu sebesar 0,66 point dari 66,14 persen di tahun 2020 menjadi 65,48 persen di tahun 2021. Dan APS penduduk berumur 19-24 tahun mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,20 point dari 10,20 persen di tahun 2020 menjadi 10,42 persen di tahun 2022.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Berbeda dengan Angka Partisipasi Sekolah yang dilihat melalui kelompok umur, Angka Partisipasi Murni atau APM digunakan untuk melihat partisipasi sekolah menurut jenjang pendidikan tertentu, SD, SMP maupun SMA. Secara umum di Kabupaten Subang APM SD lebih tinggi jika dibandingkan dengan APM SMP dan SMA, hal ini menggambarkan bahwa hampir semua penduduk mengenyam pendidikan SD.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pola yang sama seperti APS juga terjadi di APM, APM penduduk laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan pada semua jenjang pendidikan baik dari SD, SMP maupun SMA. Tetapi secara umum terlihat bahwa persentase penduduk yang masih bersekolah tersebut semakin sedikit dengan meningkatnya jenjang pendidikannya. Hal tersebut tergambar pada persentase APM yang semakin kecil angkanya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Grafik 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 5-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2022

Dua indikator tersebut yaitu APS dan APM memberikan gambaran bahwa masih terdapat kesenjangan pendidikan di Kabupaten Subang, baik antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan-kesenjangan tersebut bisa disebabkan oleh fasilitas pendidikan yang belum memadai, faktor ekonomi, maupun pola pikir masyarakat. Oleh karena itu pemerintah masih harus terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan, fasilitas dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan bagi seluruh kalangan masyarakat.

Bab 4

Ketenagakerjaan

<https://subangkajournalps.go.id>

4 KETENAGAKERJAAN

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2022 Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang

bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/ gaji/pendapatan bersih.

4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kabupaten Subang Agustus 2022 sebanyak 1,26 juta orang. Adapun jumlah angkatan kerja

(penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) pada Agustus 2022 mencapai 868,1 ribu orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proporsi angkatan kerja di Kabupaten Subang sebesar 68,87 persen dari total penduduk berusia 15 tahun keatas.

Grafik 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja di Kabupaten Subang, Agustus 2022



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2022

Dari total angkatan kerja sebanyak 868,13 ribu orang pada Agustus 2022, sebanyak 92,23 persennya melakukan aktivitas bekerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi.

Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2022 mencapai 800,70 ribu orang. Dari sejumlah penduduk yang bekerja tersebut terdapat 371,67 ribu jiwa yang bekerja di daerah perkotaan. Sedangkan di daerah pedesaan terdapat 429,02 ribu orang. Hal tersebut menggambarkan bahwa peluang bekerja masih banyak terdapat di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan.

Grafik 4.2 Jumlah Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja di Kabupaten Subang Tahun 2022

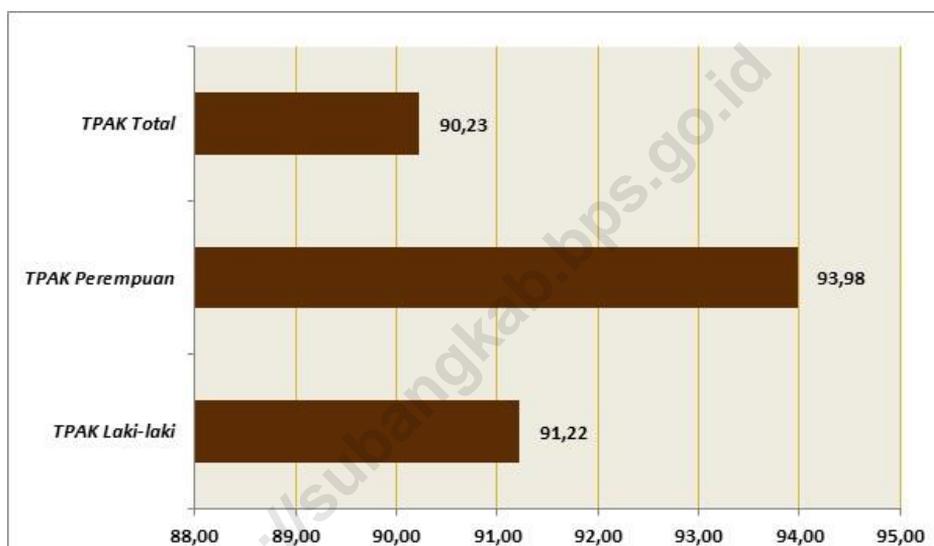


Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2022

Dari penduduk yang termasuk angkatan kerja tahun 2022 yaitu 868.132 orang, diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tercipta adalah 90,23 persen. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK perempuan lebih tinggi dari laki-laki pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi lapangan pekerjaan di Kabupaten Subang dikuasai oleh tenaga kerja perempuan. Keadaan Agustus 2022 TPAK laki-

laki di Kabupaten Subang mencapai 91,22 persen sedangkan TPAK perempuan 93,98 persen.

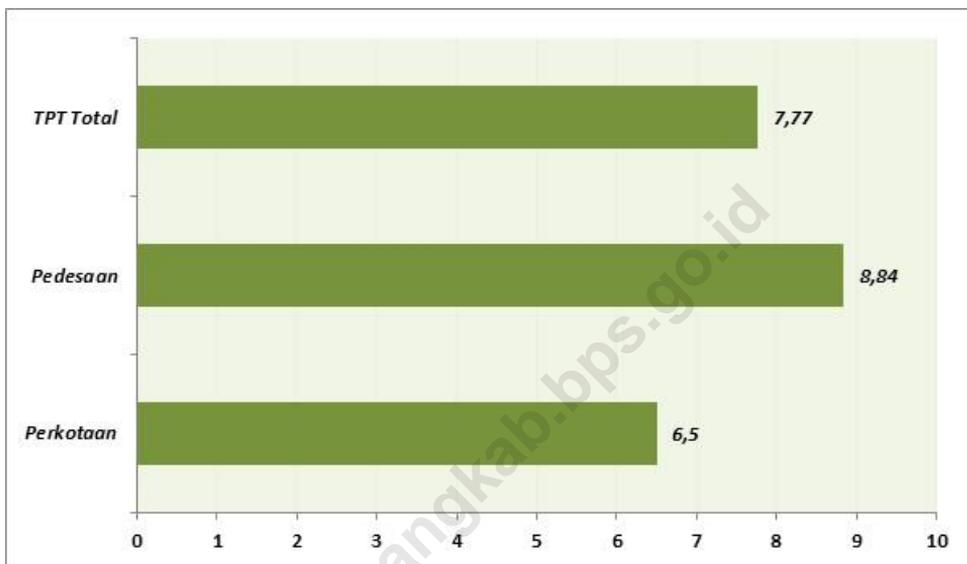
Grafik 4.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Subang, Agustus 2022



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2022

Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Subang sebesar 90,23 persen, menghasilkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada keadaan Agustus 2022 sebesar 7,77 persen. TPT di daerah perkotaan pada Agustus 2022 tersebut berada pada angka 6,5 persen. Sedangkan di daerah pedesaan adalah sebesar 8,84 persen. Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah pengangguran di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di daerah pedesaan.

Grafik 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kabupaten Subang, Agustus 2022



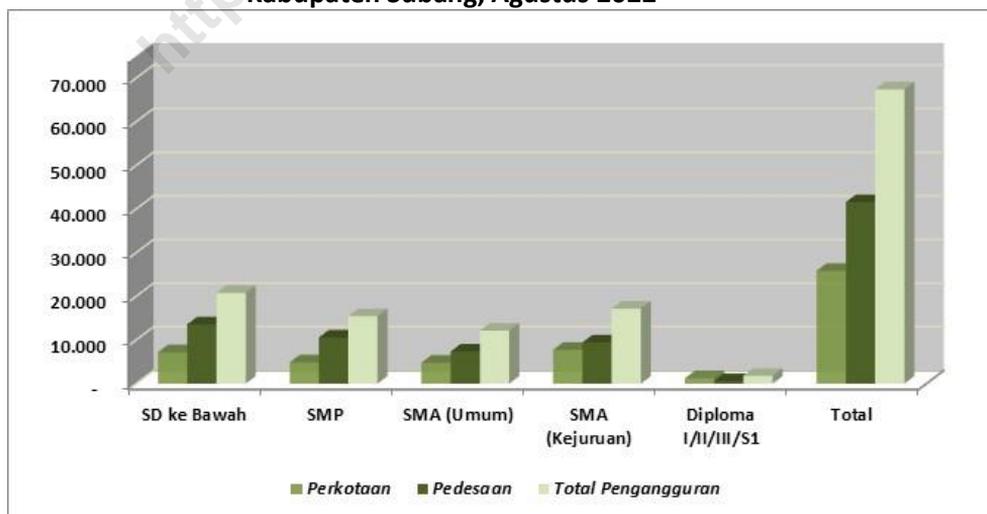
Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2022

Jumlah penganggur pada Agustus 2022 di Kabupaten Subang adalah 82,67 ribu orang. Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggalnya, penduduk yang menganggur lebih banyak ditemukan di daerah pedesaan daripada di perkotaan. Jumlah pengangguran di pedesaan keadaan Agustus 2022 mencapai 41,58 ribu orang, sedangkan di perkotaan mencapai 25,84 ribu orang. Masih cukup tingginya tingkat pengangguran di perkotaan menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di perkotaan belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Hal ini terkait dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas dan kurang beragam.

4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan. Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Grafik 4.5 Jumlah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Subang, Agustus 2022



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2022

Dari 67,43 ribu orang yang termasuk pengangguran di Kabupaten Subang tahun 2022 didominasi oleh pengangguran yang berpendidikan SD kebawah, yaitu mencapai 20,79 ribu orang, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,39 persen. Angkatan kerja lulusan SD kebawah yang menganggur di pedesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan yaitu 13,59 ribu dibanding 7,19 ribu orang. Jika dilihat dari komposisi penganggur menurut ijazah yang dimiliki, penganggur dengan ijazah SD ke bawah mencapai 30,83 persen dari total pengangguran terbuka. Penganggur lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga memegang porsi cukup besar, yaitu mencapai 25,49 persen. Sedangkan proporsi pengangguran dengan pendidikan tinggi yaitu D-1 keatas hanya 2,71 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa lapangan pekerjaan yang ada di perkotaan maupun pedesaan membutuhkan tingkat pendidikan/keahlian yang lebih tinggi atau tingkat ketrampilan yang lebih memadai.

Tabel 4.1 Jumlah Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Ijazah yang Dimiliki di Kabupaten Subang, 2022

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah Pengangguran		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar ke Bawah	16.344	4.444	20.788
Sekolah Menengah Pertama	12.501	2.966	15.467
Sekolah Menengah Atas (Umum)	5.217	6.945	12.162
Sekolah Menengah Atas (Kejuruan)	12.895	4.293	17.188
Diploma I/II/III/Sarjana	1.232	594	1.826
Total	48.189	19.242	67.431

sumber : Sakernas Agustus 2022

Selama periode 2022, angkatan kerja yang tidak mempunyai ijazah dan berijazah SD, SMP, SMK, dan Diploma1/II/III/Sarjana, jumlah pengangguran dari jenis kelamin Laki-laki lebih besar dibandingkan Perempuan. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/umum, pengangguran perempuan jumlahnya lebih banyak dibandingkan laki-laki. Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk tenaga kerja perempuan lebih banyak yang terserap dikarenakan tingkat ketrampilan tenaga kerja perempuan lebih dibutuhkan oleh dunia kerja.

Hal tersebut diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja bagi kelompok tersebut. Dengan pembukaan lapangan kerja baru bagi mereka di daerahnya sendiri akan menurunkan angka urbanisasi dan diharapkan dapat turut serta dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Sedangkan untuk penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja diharapkan dapat berpartisipasi dengan berwirausaha sehingga dapat turut serta membangun daerahnya. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mendorong dan memberi insentif bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwirausaha.

4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 5 lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan); Industri pengolahan; Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel; Jasa kemasyarakatan; dan Lainnya.

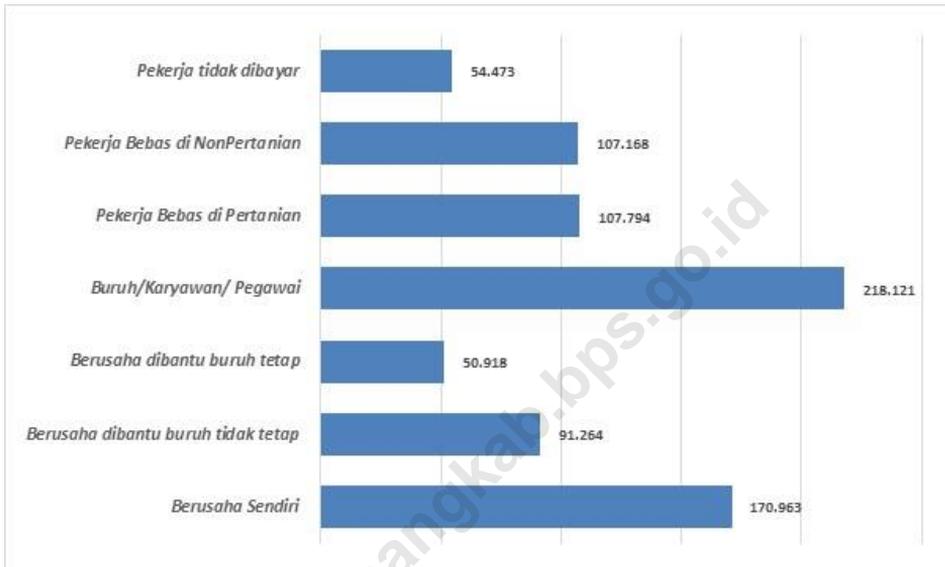
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas, Agustus 2022) terlihat bahwa sebanyak 244,91 ribu orang atau sekitar 30,59 persen tenaga kerja terserap pada lapangan usaha Pertanian, kemudian sebanyak 179,55 ribu orang atau 22,42 persen pada lapangan usaha Industri Pengolahan. Kemudian sebanyak 376,24 ribu orang atau 46,99 persen tenaga kerja terserap pada lapangan usaha industri pengolahan.

Tabel 4.2 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan di Kabupaten Subang, Agustus 2022

Lapangan Usaha	Total
Pertanian	244.910
Industri Pengolahan	179.554
Jasa	376.237

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2022

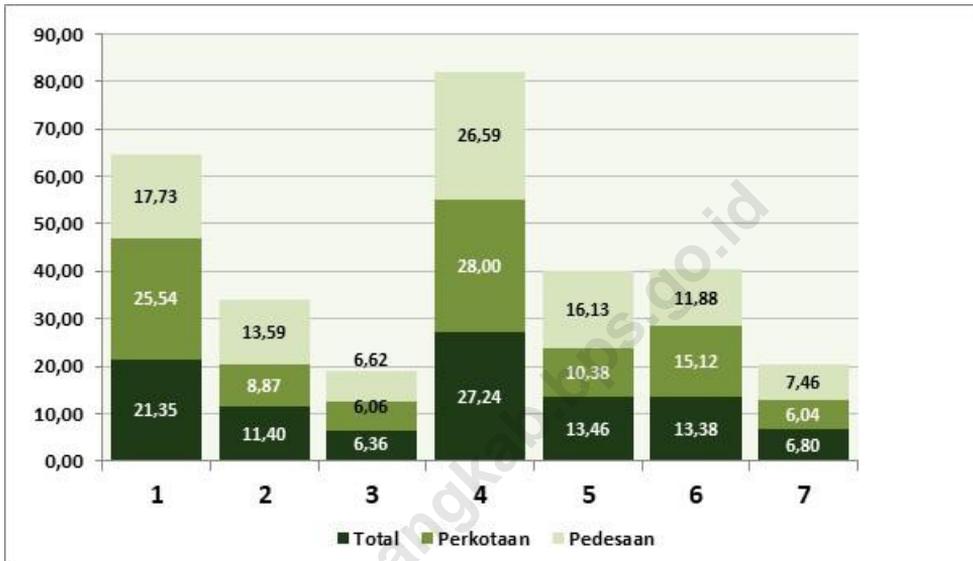
Grafik 4.6 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Subang, Agustus 2022



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2022

Pada periode Agustus 2022 jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan masih mendominasi dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan pada Agustus 2022 mencapai 218,12 ribu orang atau sebesar 27,24 persen. Memiliki usaha sendiri dalam dunia kerja juga mulai berkembang di wilayah Kabupaten Subang, terlihat dengan status berusaha sendiri dalam pekerjaan yang menyerap 21,35 persen tenaga kerja. Sedangkan berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar hanya menyerap 11,40 persen tenaga kerja pada Agustus 2022.

Grafik 4.7 Struktur Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja di Kabupaten Subang, Agustus 2022



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2022

4.4 Sektor Formal dan Sektor Informal

Konsep informal yang digunakan dalam publikasi ini mengacu pada kesepakatan dalam ICLS ke-17 (17th *International Conference on Labor Statisticians*) tahun 2003. Sektor informal adalah sekelompok unit produksi yang merupakan bagian dari sektor rumah tangga, atau apa yang disebut sebagai usaha rumah tangga tidak berbadan hukum (*Household Unincorporated Enterprise*)

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja informal sebagai "karyawan dianggap memiliki pekerjaan informal jika hubungan kerja mereka tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, tidak dikenakan pajak pendapatan, minimnya perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja (seperti pemberitahuan pemecatan sebelumnya, sistem pembayaran gaji tanpa rincian/nota, atau tiadanya hak cuti, ijin sakit, dll)".

Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk konsep pekerjaan dan bukan untuk tenaga kerja karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: (1) usaha sendiri informal dan (2) pekerjaan upahan informal yang dipekerjakan di usaha formal atau informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, tanpa jaminan ketenagakerjaan atau perlindungan sosial. Adapun yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi/kemitraan produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Perbedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi/kemitraan produksi informal (Buku Pedoman Pencacah Survei Sektor Informal 2014, BPS).

Tabel 4.3 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Informal Menurut Wilayah di Kabupaten Subang, Agustus 2022

Wilayah	Jumlah
Perkotaan	245.097
Pedesaan	286.565
Total	531.662

Sumber : Sakernas 2022

Pada keadaan tahun 2022 jumlah penduduk bekerja pada sektor informal mencapai 531.662 orang atau sekitar 66,40 persen dari total penduduk yang bekerja di Kabupaten Subang. Dari sejumlah pekerja sektor informal tersebut, 46,10 persen berada di daerah perkotaan sedangkan sisanya 53,90 persen berada di pedesaan. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan sektor informal di wilayah pedesaan lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan wilayah perkotaan. Jika dilihat menurut jenis kelamin, 61,68 persen pekerja informal tersebut adalah tenaga kerja laki-laki. Sedang sisanya 38,32 persen adalah pekerja perempuan. Hal ini berarti bahwa tenaga kerja laki-laki lebih banyak terjun dalam sektor informal dibandingkan tenaga kerja perempuan.

Bab 5

Pola Konsumsi

<https://subangkabpps.go.id>

5 POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

5.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat

konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kabupaten Subang, 2022

Kelompok Barang	Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)		
	Kurang dari 300.000	300.000 - 499.999	500.000 - 749.999
Makanan	307.959	263.640	382.678
Non Makanan	140.083	166.165	256.500
Jumlah Makanan & Non Makanan	448.042	429.805	639.178

Sumber : Pola Konsumsi Penduduk Jawa Barat 2022

Tabel 5.1 Lanjutan

Kelompok Barang	Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)		
	750.000 – 999.999	1.000.000 – 1.499.999	Lebih dari 1.500.000
Makanan	523.971	689.029	1.152.401
Non Makanan	348.627	502.511	1.334.168
Jumlah Makanan & Non Makanan	872.598	1.191.540	2.486.569

Sumber : Pola Konsumsi Penduduk Jawa Barat 2022

Tabel 5.1 menyajikan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut golongan pengeluaran dan kelompok barang. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa pengeluaran per kapita yang ada di Kabupaten Subang di dominasi oleh pengeluaran untuk kelompok makanan dibandingkan dengan kelompok non makanan.

Grafik 5.1 Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kabupaten Subang 2022



Sumber : Pola Konsumsi Penduduk Jawa Barat 2022

Grafik 5.1 menyajikan persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk di wilayah Kabupaten Subang tahun 2022 per kelompok pengeluaran. Dari grafik tersebut terlihat bahwa selama tahun 2022 rata-rata pengeluaran perkapita sebulan masih di dominasi dengan kelompok barang makanan yang pengeluarannya lebih dari 50 persen pada setiap golongan pengeluaran kecuali untuk kelompok pengeluaran

diatas 1,5 juta rupiah. Sedangkan pengeluaran untuk kelompok barang Non Makanan ada pada kisaran 20-50 persen.

Tabel 5.2 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang dan Wilayah Tempat Tinggal di Jawa Barat, 2022

Kelompok Barang	Golongan Pengeluaran			
	Kurang dari 300.000	300.000	500.000	750.000
		-	-	-
	499.999	749.999	999.999	
Makanan				
1. Padi-padian	98.230	53.323	57.308	61.961
2. Umbi-umbian	2.253	3.178	3.494	4.203
3. Ikan	4.019	20.306	23.816	30.213
4. Daging	3.171	8.458	15.260	20.183
5. Telur dan Susu	25.093	16.814	22.551	23.629
6. Sayur-sayuran	39.538	21.351	24.652	35.728
7. Kacang-kacangan	6.415	6.234	8.829	11.433
8. Buah-buahan	4.054	8.370	12.166	19.693
9. Minyak dan Lemak	10.185	7.792	9.610	15.857
10. Bahan minuman	9.528	8.715	12.102	15.462
11. Bumbu-bumbuan	13.317	5.343	7.731	10.849
12. Konsumsi lainnya	3.625	5.708	9.890	11.261
13. Makanan dan minuman jadi	58.505	75.503	109.784	165.142
14. Tembakau dan sirih	30.029	22.545	65.486	98.359
Jumlah Makanan	307.962	263.640	382.679	523.973

Kelompok Barang	Golongan Pengeluaran			
		300.000	500.000	750.000
	Kurang dari 300.000	-	-	-
		499.999	749.999	999.999
Non Makanan				
1. Perumahan dan Fasilitas rumah tangga	73.379	108.831	170.734	229.869
2. Barang dan jasa	50.595	37.433	54.168	71.534
3. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	12.631	8.188	12.818	19.559
4. Barang-barang yang tahan lama	1.768	4.633	4.145	7.819
5. Pajak dan asuransi	1.711	5.818	14.073	17.387
6. Keperluan pesta dan upacara	-	1.261	563	2.459
Jumlah Non Makanan	140.084	166.164	256.501	348.627
Jumlah Makanan dan Non Makanan	448.046	429.804	639.180	872.600

Sumber : Pola Konsumsi Penduduk Jawa Barat 2022

Tabel 5.2 Lanjutan

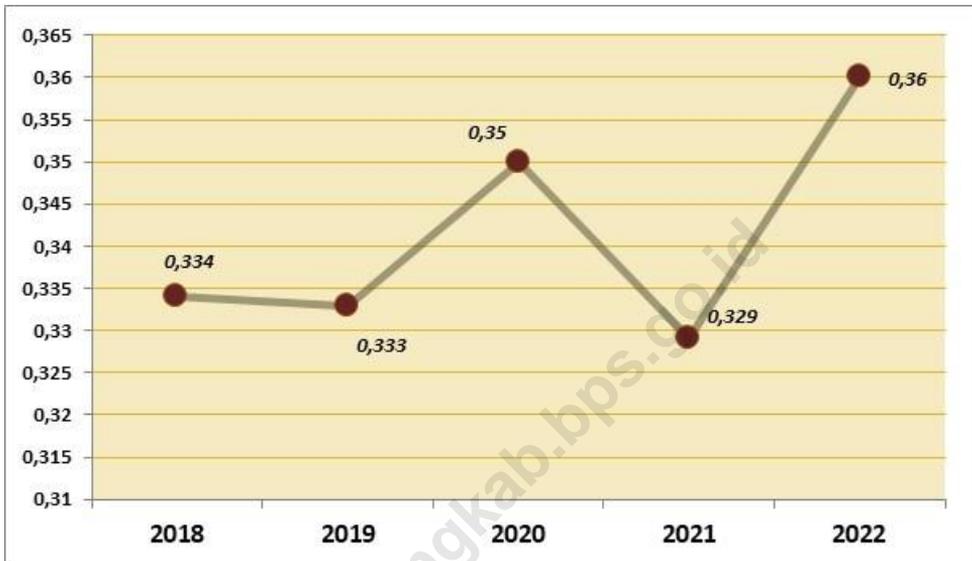
Kelompok Barang	Golongan Pengeluaran		
	1.000.000 -	Lebih Dari 1.500.000	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita
Makanan			
1. Padi-padian	71.803	92.885	69.502
2. Umbi-umbian	5.280	8.766	5.257
3. Ikan	37.560	81.118	41.543
4. Daging	28.850	63.421	30.178
5. Telur dan Susu	37.110	63.182	35.291
6. Sayur-sayuran	43.617	72.601	41.958
7. Kacang-kacangan	16.615	23.445	14.231
8. Buah-buahan	28.750	63.765	29.302
9. Minyak dan Lemak	17.785	27.805	16.660
10. Bahan minuman	19.461	30.312	18.344
11. Bumbu-bumbuan	12.482	20.962	12.272
12. Konsumsi lainnya	17.127	24.378	14.795
13. Makanan dan minuman jadi	232.123	400.764	213.219
14. Tembakau dan sirih	120.466	178.996	106.196
Jumlah Makanan	689.029	1.152.400	648.749

Kelompok Barang	Golongan Pengeluaran		
	1.000.000 -	Lebih Dari 1.500.000	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita
Non Makanan			
1. Perumahan dan Fasilitas rumah tangga	319.555	618.099	316.225
2. Barang dan jasa	101.910	319.940	131.501
3. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	25.985	55.867	26.915
4. Barang-barang yang tahan lama	16.485	95.364	30.119
5. Pajak dan asuransi	27.927	60.036	28.101
6. Keperluan pesta dan upacara	10.649	184.862	49.067
Jumlah Non Makanan	502.511	1.334.168	581.928
Jumlah Makanan dan Non Makanan	1.191.540	2.486.568	1.230.677

Sumber : Pola Konsumsi Penduduk Jawa Barat 2022

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan indikator yang sering digunakan, yaitu Indeks Gini.

Grafik 5.2 Indeks Gini Kabupaten Subang, 2018 – 2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2022

Jika dilihat dari grafik 5.2, indeks gini Kabupaten Subang sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Dari angka 0,334 di tahun 2018, indeks gini menurun menjadi 0,333 di tahun 2019 dan kembali naik pada tahun 2020 menjadi 0,35. Dan di tahun 2021 kembali menurun menjadi 0,329. Kemudian naik menjadi 0,36 di tahun 2022. Dengan melihat angka ini, pada tahun 2019 dan 2021, pemerataan pendapatan masyarakat di Kabupaten Subang ada pada tingkat ketimpangan sedang.

Bab 6

Perumahan dan
Lingkungan

<https://siskengkarbps.go.id>

6 PERUMAHAN & LINGKUNGAN

Kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang adalah papan. Papan dalam hal ini adalah kebutuhan akan rumah tempat tinggal yang layak baik dari segi fisik, fasilitas maupun lingkungannya. Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Fungsi rumah adalah sebagai tempat tinggal, selain itu juga dapat rumah menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Status sosial seseorang yang makin tinggi, semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik dan fasilitas yang lengkap. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan.

Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Terdapat beberapa kriteria rumah tinggal yang harus dipenuhi sehingga dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal. Kriteria tersebut diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Data hasil Susenas 2022 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,94 persen. Pada tahun 2022, rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 97,74 persen atau mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar 96,80 persen.

Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Subang 2021-2022

Indikator	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai bukan tanah	%	96,80	97,74
Atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes	%	96,23	99,49
Dinding terluas tembok dan kayu	%	92,12	93,39
Rata-rata luas lantai per kapita \geq 7,2 m ²	m ²	96,95	97,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Subang 2022

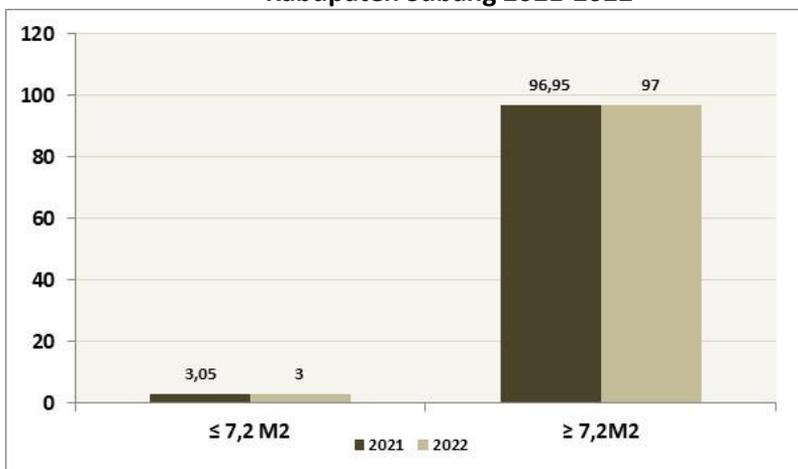
Selain jenis lantai terluas, indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Berdasarkan hasil Susenas 2022 rumah tinggal dengan atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes mencapai 99,49 persen, naik 3,26 dari tahun 2021 sebesar 96,23 persen. Selanjutnya kondisi yang sama juga terjadi pada bangunan rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas tembok dan kayu yang meningkat dari 92,12 persen menjadi 93,39 persen pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 1,27 persen.

Di Indonesia, pelaksanaan MDGs telah memberikan perubahan yang positif. Walaupun masih ada beberapa target MDGs yang masih diperlukan kerja keras untuk mencapainya, tetapi sudah banyak target yang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan bahkan telah tercapai. Berkaitan dengan berakhirnya agenda pelaksanaan MDGs pada tahun 2015, maka dicanangkan agenda SDGs sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan MDGs. Salah satu goals atau tujuan dari SDGs adalah membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka melalui Kemertian PPN/Bappenas dalam Kebijakan Nasional Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 yang tertuang dalam Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 ditetapkanlah definisi hunian layak yaitu kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan kecukupan luas tempat tinggal yang memenuhi standar luas lantai per kapita sebesar 7,2 m².

Data hasil Susenas tahun 2022 menunjukkan bahwa di Kabupaten Subang persentase rumah tangga yang memiliki rata-rata luas lantai per

kapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$ adalah sebesar 97,00 persen. Jika dibandingkan dengan data tahun 2021, maka terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$. Peningkatan ini mencapai 0,05 persen dari tahun 2021. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kemampuan penduduk di Kabupaten Subang memiliki rumah yang layak sesuai jumlah anggota keluarga semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase rumah tangga yang memiliki rata-rata luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$ di Kabupaten Subang dapat dilihat pada Grafik 6.1. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa Kabupaten Subang rata-rata luas lantai yang ditempati per kapita $\leq 7,2 \text{ m}^2$ pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan luas lantai dengan kategori $\geq 7,2 \text{ m}^2$ mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kepadatan hunian dalam suatu rumah berkurang atau dengan kata lain ruang gerak per kapita dalam suatu rumah menjadi semakin lebih luas.

Grafik 6.1 Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kabupaten Subang 2021-2022



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Subang 2022

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal merupakan pemenuhan atas kebutuhan aktivitas seluruh anggota rumah tangga. Kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih yang tersedia dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Rumah tangga di Kabupaten Subang tahun 2022 yang menggunakan air kemasan/air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum mencapai 38,07 persen. Terdapat penurunan persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan/air isi ulang dan ledeng sebagai air minum dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencapai sebesar 38,63 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber air minum yang bersih dan layak semakin menurun.

Selanjutnya persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2022 telah mencapai 91,41 persen, naik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 90,08 persen. Air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja lebih dari 10 m.

Tabel 6.2. Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, Tahun 2021 -2022

Indikator	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Air Kemasan, air isi ulang & ledeng	%	38,63	38,07
Air minum bersih *)	%	90,08	91,41
Jamban sendiri	%	88,70	92,20
Jamban sendiri dengan tangki septik	%	84,72	75,72
Sumber penerangan listrik PLN	%	99,35	99,92

*) Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, dan *(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja 10 m+

Sumber : Susenas, 2022

Selain fasilitas ketersediaan air minum, penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Pembuangan kotoran manusia yang tidak sesuai dengan standar kesehatan akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Dampak lebih lanjutnya menyebabkan berbagai macam penyakit seperti thypus, disentri, kolera, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Salah satu fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Selama tahun 2021-2022 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri meningkat dari 88,70 persen menjadi 92,20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan jamban sendiri sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga. Selanjutnya selain telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2022 rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik mencapai 75,72 persen atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 84,72 persen.

Selain air bersih dan jamban, fasilitas rumah tinggal lainnya yang juga penting adalah penerangan. Secara umum sumber penerangan yang utama berasal dari listrik baik dari PLN maupun Non PLN. Cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Hasil Susenas tahun 2022 menunjukkan bahwa 99,92 persen rumah tangga di Kabupaten Subang telah menikmati fasilitas penerangan listrik PLN, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 99,35 persen.

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau

status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Tabel 6.3. Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Subang, 2021-2022

Indikator	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik sendiri	%	90,22	93,16
Kontrak/Sewa	%	1,56	1,66
Bebas Sewa	%	8,09	5,08
Rumah Dinas/lainnya	%	0,12	0,11

Sumber : Susenas, 2021

Hasil Susenas 2022 menunjukkan 93,16 persen status kepemilikan rumah sebagai milik sendiri, sisanya 6,84 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 1,66 persen kontrak/sewa, 5,08 persen bebas sewa, dan 0,11 persen rumah dinas/lainnya.

Jika kita amati status kepemilikan rumah pada periode 2021 – 2022, maka dapat kita lihat bawa rumah tinggal yang milik sendiri mengalami kenaikan sebesar 2,94 persen. Hal tersebut terjadi karena adanya indikasi bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah keluarga di Kabupaten Subang, maka kebutuhan akan rumah semakin meningkat. Salah satu solusi bagi keluarga yang belum mampu memiliki rumah sendiri adalah dengan kontrak/sewa, bebas sewa atau menempati rumah dinas/kainnya. Fakta ini didukung dengan

meningkatnya status kepemilikan rumah tinggal yang kontrak/sewa pada periode 2022 yang meningkat sebesar 0,10 persen. Peningkatan yang sama juga terjadi pada status kepemilikan rumah bebas sewa menurun sebesar 3,01 persen dan rumah dinas menurun sebesar 0,01 persen. Peningkatan yang sangat pesat terlihat pada status rumah dinas/lainnya.

<https://subangkab.bps.go.id>

Bab 7

Kemiskinan

<https://subangkabps.go.id>

7 KEMISKINAN

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan

oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai program pemberantasan kemiskinan dirancang dan diterapkan di berbagai negara baik negara

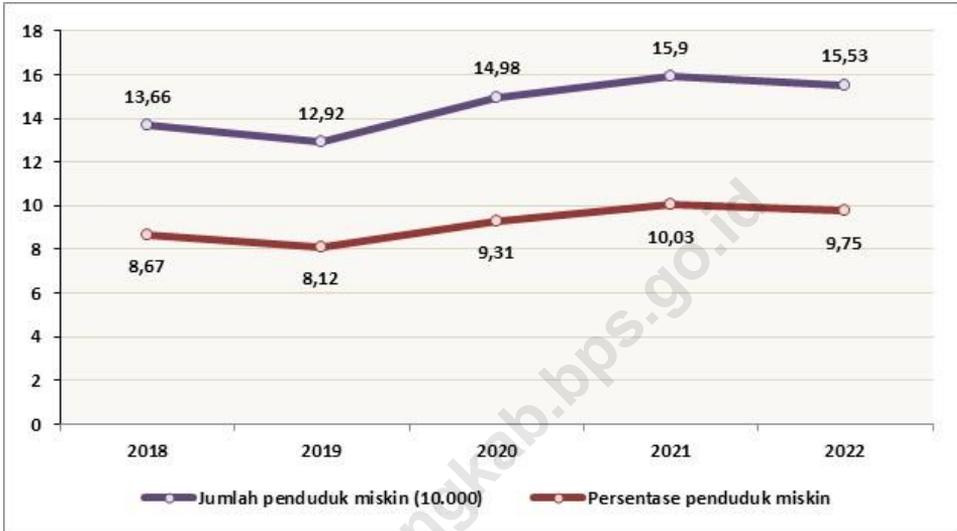
maju maupun negara berkembang. Terbentuknya *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai pengganti *Millenium Development Goals (MDGs)* merupakan agenda pembangunan Pasca MDGs yang berakhir tahun 2015. Target yang pertama dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator pendukung antara lain menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari \$1,25 per hari. Indikator lain yang terkait dalam mengakhiri kemiskinan antara lain melindungi orang yang miskin dan rentan dengan sistem perlindungan sosial.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kabupaten Subang secara total menunjukkan tren fruktuatif selama periode 2018-2022 (keadaan bulan Maret). Tahun 2019, jumlah penduduk miskin sebesar 129,2 ribu jiwa atau 8,12 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Subang. Meningkat di dua tahun berikutnya menjadi 9,31 persen di tahun 2020 dan 10,03 persen di tahun 2021. Kemudian menurun menjadi 9,75 persen atau berjumlah 155,3 ribu jiwa di tahun 2022.

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga; kondisi perumahan; dan persebarannya menurut kabupaten/kota. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

Grafik 7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Subang, 2018-2022 (Maret, puluhan ribu Orang)

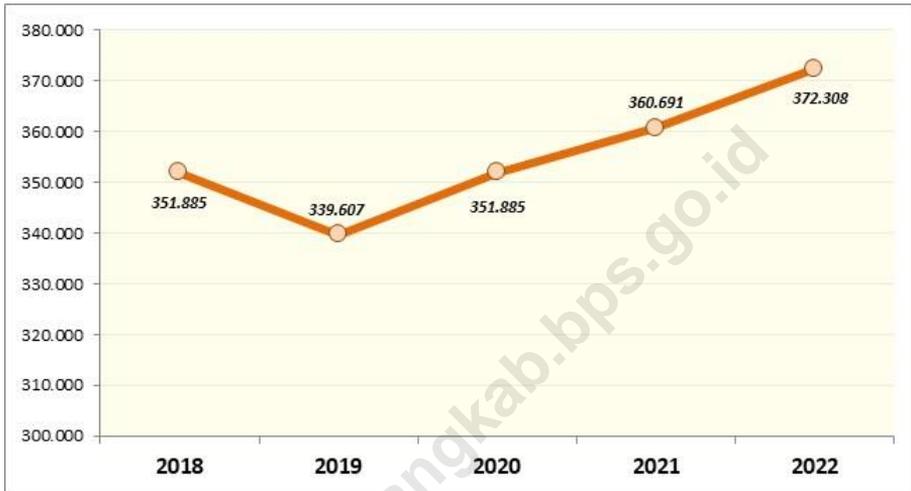


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2022

7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Subang mengalami fluktuatif selama periode 2018-2022. Pada tahun 2019 garis kemiskinan menurun sebesar Rp. 12.278,- dari tahun 2018 menjadi Rp. 339.607, kemudian di tahun 2020 garis kemiskinan meningkat menjadi Rp. 351.885,- dan kembali meningkat di tahun 2021 serta tahun 2022 berturut-turut menjadi Rp. 360.691,- dan 372.308,-

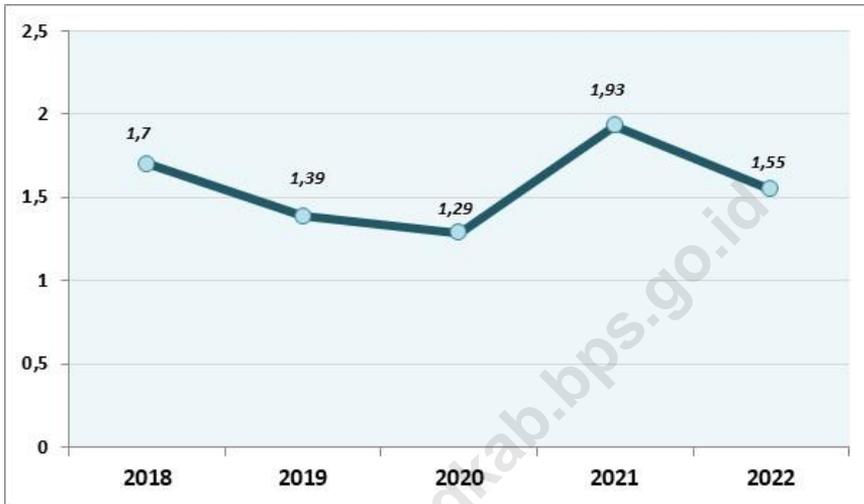
**Grafik 7.2 Garis Kemiskinan di Kabupaten Subang, 2018 - 2022
(Rupiah/Kapita/Bulan)**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2018 – 2022 P1 mengalami fluktuasi, dimana nilai tahun 2018 sebesar 1,7, kemudian menurun menjadi 1,39 dan 1,29 di tahun 2019 dan tahun 2020. Nilai P1 kembali naik di tahun 2021 menjadi sebesar 1,93. Kemudian menurun di tahun 2022 menjadi 1,55. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

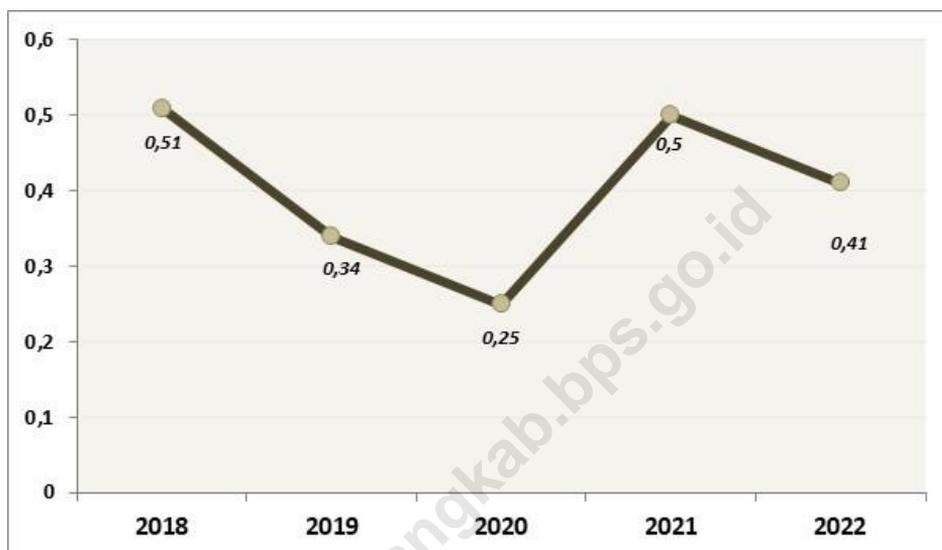
Grafik 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Subang, Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan P1, P2 juga mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 sampai 2020 terus menurun. Pada tahun 2019 indeks keparahan kemiskinan menurun cukup signifikan menjadi 0,34 dan kembali menurun di tahun 2020 menjadi 0,25. Kemudian di tahun 2022 naik menjadi 0,5. Dan turun lagi di tahun 2022 menjadi 0,41. Penurunan nilai indeks menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik 7.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Subang 2018 - 2022

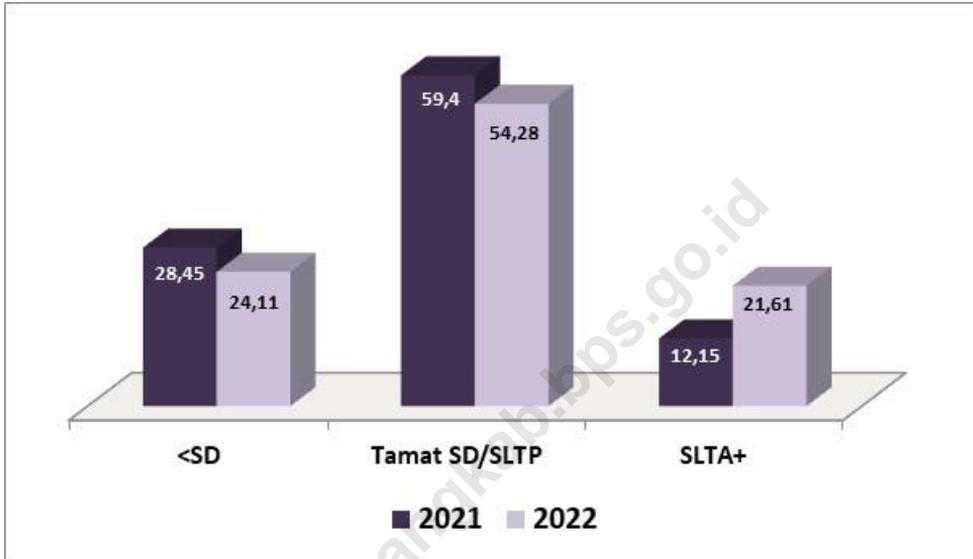


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

7.3 Karakteristik Pendidikan

Perbaikan tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang baik cenderung mengupayakan anggota rumah tangga yang dipimpinya juga memiliki tingkat pendidikan yang baik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga cenderung akan memiliki tingkat pendapatan yang semakin tinggi, dan semakin kecil kemungkinan rumah tangga tersebut berada dalam kondisi miskin. Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani pengentasan kemiskinan selain pendidikan kepala rumah tangga yaitu pendidikan anak dari rumah tangga miskin. Anak dalam rumah tangga miskin apabila diberi kesempatan menempuh pendidikan yang memadai maka besar kemungkinan untuk keluar dari kemiskinannya di masa depan.

Grafik 7.5 Penduduk Miskin Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Subang, 2020 - 2022



Sumber : Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Subang menurut pendidikan yang ditamatkan tahun 2022 menunjukkan sebagian besar penduduk miskin adalah tamat SLTP ke bawah. Sebanyak 54,28 persen penduduk miskin tamat SD/SLTP dan sederajat. Kemudian 24,11 persen penduduk miskin adalah tidak tamat SD. Adapun penduduk miskin yang pendidikannya tamat SLTA/sederajat atau lebih mencapai 21,61 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesempatan rumah tangga untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan rumah tangga tersebut rentan dengan kondisi miskin.

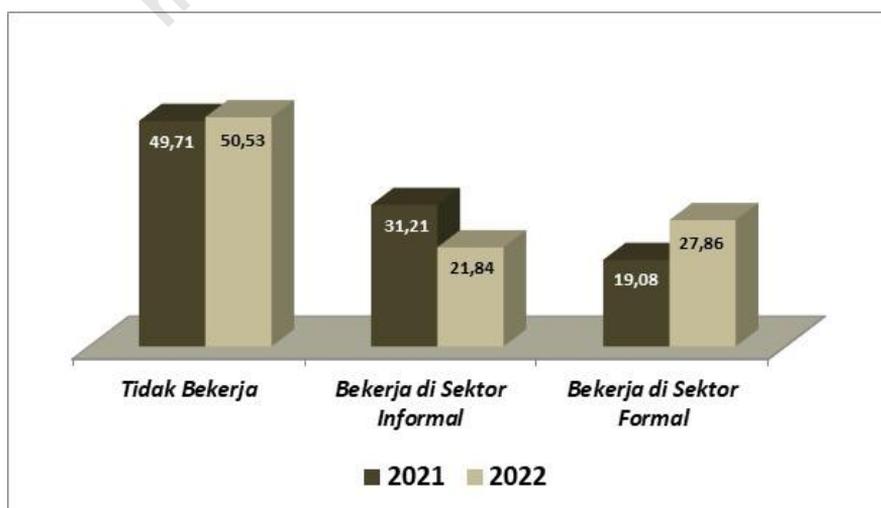
Jika dibandingkan dengan tahun 2021, maka terlihat adanya peningkatan taraf pendidikan yang ditamatkan bagi penduduk miskin terutama pada tingkat pendidikan SLTA keatas. Pada tahun 2021

persentase penduduk miskin yang tidak tamat SD mencapai 28,45 persen, sedangkan pada tahun 2022 menurun 4,34 persen menjadi 24,11 persen. Untuk jenjang pendidikan SLTA keatas, persentase penduduk miskin yang menamatkannya pada tahun 2022 mencapai 21,61 persen. Meningkat 9,46 persen dibandingkan tahun 2021 yaitu 12,15.

7.4 Karakteristik Ketenagakerjaan

Indikator kedua setelah pendidikan yang dapat digunakan untuk melihat karakteristik rumah tangga miskin yaitu ketenagakerjaan. Persentase penduduk miskin yang tidak bekerja mencapai 50,53 persen pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, maka mengalami kenaikan 0,82 persen dari 49,71 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk miskin sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Grafik 7.6 Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kabupaten Subang, 2021 - 2022



Sumber : Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, maka persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja dan bekerja pada sektor formal mengalami kenaikan, sedangkan penduduk miskin yang bekerja di sektor informal mengalami penurunan yaitu dari 31,21 persen ditahun 2021 menjadi 21,84 persen di tahun 2022. Hal ini menggambarkan bahwa dengan tingkat pendidikan yang terbatas dan status kemiskinan yang dialami bahwa mereka hanya dapat bekerja di sektor informal yang tidak memerlukan pendidikan atau ketrampilan khusus.

Menurunnya jumlah penduduk yang tidak bekerja mengindikasikan bahwa jumlah penduduk yang bekerja semakin meningkat. Meningkatnya persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja tersebut tergambar pada persentase penduduk yang bekerja sebesar 50,30 persen dari total 155,3 ribu jiwa penduduk miskin yang ada di Kabupaten Subang, naik sebesar 0,82 persen dibandingkan tahun lalu. Dari 50,30 persen penduduk yang bekerja tersebut, ada sebanyak 21,84 persen bekerja di sektor pertanian dan 27,86 persen bekerja di luar sektor pertanian. Peningkatan pekerja di sektor pertanian seiring dengan program pemerintah Kabupaten Subang dalam meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Subang.

Grafik 7.7 Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja dan Bidang Pekerjaan di Kabupaten Subang, 2021 – 2022



Sumber : Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

7.5 Karakteristik Perumahan

Karakteristik rumah tangga miskin yang tak kalah penting untuk diperhatikan selain pendidikan dan ketenagakerjaan adalah perumahan. Salah satu faktor penting dalam unsur tempat tinggal yang perlu mendapat perhatian adalah ketersediaan fasilitas air minum dan jamban. Di Kabupaten Subang, persentase rumah tangga miskin yang mengakses air layak pada tahun 2022 mencapai 100,00 persen. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air

kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung (<https://sirusa.bps.go.id>).

Pemerintah terus mengupayakan peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih. Air bersih sebagai sumber air minum merupakan komponen penting dalam mendukung kehidupan yang lebih sehat. Air minum yang tidak terjamin kebersihannya berbahaya bagi kesehatan karena dapat menimbulkan penyakit. Ketika kepala rumah tangga atau ada anggota rumah tangga yang sakit, pengeluaran untuk berobat akan semakin menambah beban rumah tangga tersebut yang pada akhirnya semakin mendorong ke tingkat kemiskinan yang semakin dalam (TNP2K, 2010).

Ketersediaan sanitasi untuk setiap rumah tangga miskin di Kabupaten Subang pada tahun 2022 juga sudah cukup memadai. Hal ini ditunjukkan dengan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan fasilitas jamban sendiri/bersama mencapai 81,53 persen.

Bab 8

Sosial Lainnya

<https://subangkajournal.go.id>

8 SOSIAL LAINNYA

Pada Bab ini akan diuraikan beberapa data sosial lainnya yang merupakan pendekatan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Cakupan pembahasan meliputi Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemberian Kredit Usaha dan Pelayanan Kesehatan Gratis serta Korban Tindak Kejahatan.

Akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Harga telepon pintar yang semakin terjangkau dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi.

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis, serta tingkat keamanan wilayahnya. Pelayanan kesehatan gratis tersebut memungkinkan masyarakat dapat mengalihkan pendapatannya pada keperluan hidup lainnya guna meningkatkan kesejahteraaannya. Selain itu pula rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas.

8.1. Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunanya.

Tabel 8.1. Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir di Kabupaten Subang, 2021-2022

Indikator	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Menggunakan Telepon Seluler (HP)	%	74,29	78,20
Menguasai/ Memiliki Telepon Seluler (HP)	%	61,46	71,84
Akses Internet	%	54,52	61,19

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, 2022

Masyarakat kini cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat

mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.

Ditahun 2022 penggunaan telepon seluler oleh anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas meningkat dibandingkan tahun 2021 dari 74,29 persen menjadi 78,20 persen.

Akses terhadap internet merupakan salah satu aplikasi terhadap teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan persentase penduduk berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 dari 54,52 persen di tahun 2021 menjadi 61,19 persen di tahun 2022.

8.2 Pemberian Kredit Usaha dan Pelayanan Kesehatan Gratis

Kredit usaha yang diterima oleh masyarakat akan berdampak positif pada pergerakan ekonomi rakyat yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bentuk-bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan. Pemberian kredit usaha ini akan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, produktifitas, dan penyediaan lapangan kerja.

Program-program kredit usaha dari pemerintah diantaranya KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diberikan oleh beberapa bank terpilih dan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. Selain itu pula terdapat Jenis program penyaluran yang lain seperti KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi), KPEN-RP (Kredit

Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan, dan KKPE (Kredit Ketahanan Pangan Energi).

Pada tahun 2022 rumah tangga penerima kredit usaha menurun sebesar 6,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari 34,16 persen pada tahun 2021 menjadi 27,95 persen pada tahun 2022.

Usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dari segi kesehatan diantaranya adalah program pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat misalnya Program Puskesmas Gratis yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang lebih ditujukan kepada rumah tangga yang tergolong kurang mampu. Jaminan pelayanan kesehatan merupakan wujud pelayanan kesehatan yang baik. Penggunaan jaminan pelayanan kesehatan yang semakin meningkat untuk mengakses fasilitas kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu karena alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk berobat dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan yang lain.

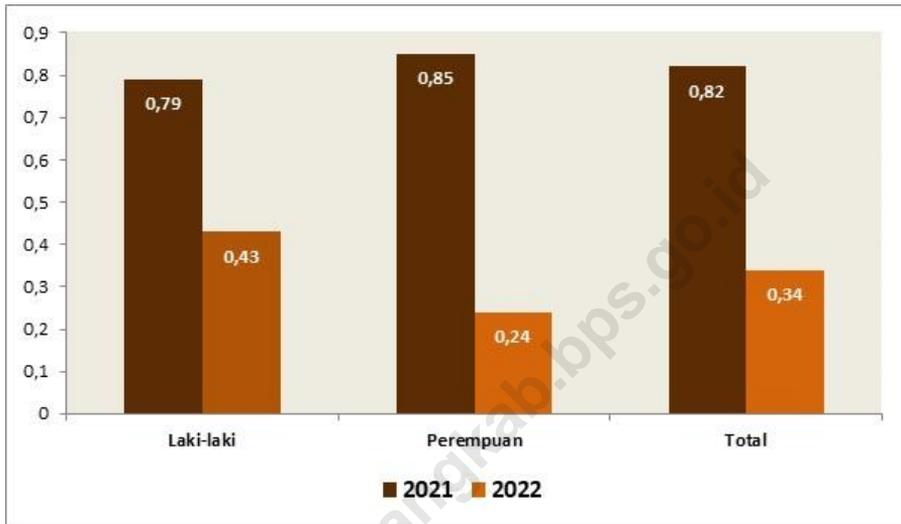
Berdasarkan hasil Susenas 2022, persentase rumah tangga pengguna jaminan pelayanan kesehatan sebesar 35,17 persen di tahun 2022. Diharapkan rumah tangga yang menggunakan jaminan pelayanan kesehatan akan meningkat sehingga dapat menambah derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Subang. Dengan meningkatnya derajat kesehatan diharapkan kapabilitas masyarakat untuk bisa hidup sejahtera juga akan meningkat.

8.3. Tindak Kejahatan

Tingkat keamanan di suatu wilayah dapat digunakan sebagai salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Persentase korban tindak kejahatan yang tinggi mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Korban kejahatan yang dicakup dalam Susenas 2022 ini adalah semua bentuk korban kejahatan kecuali kejahatan kasus pembunuhan.

Pada periode tahun 2022, penduduk yang menjadi korban kejahatan mengalami penurunan sebesar 0,48 persen menjadi 0,34 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 0,82. Peningkatan persentase korban tindak kejahatan terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Peningkatan persentase pada laki-laki mencapai 0,43 persen, sedangkan korban tindak kejahatan pada perempuan mencapai 0,24 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat keamanan masyarakat perlu ditingkatkan baik oleh aparat keamanan maupun oleh swadaya masyarakat.

Grafik 8.1. Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan di Kabupaten Subang 2022



Sumber : Susenas, 2022

DATA MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang

Jl. Aipda KS Tubun No. 12 Subang 41211, Telp : (0260) 411101 Fax : (0260) 411101

E-mail : bps3213@bps.go.id